Sajogyo Institute

PERAN SUMBER DAYA ALAM

dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian

Mohamad Shohibuddin

Sajogyo
Institute
https://sajogyo-institute.org

PERAN SUMBER DAYA ALAM
dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian

Mohamad Shohibuddin

Sajogyo Institute

Peran Sumber Daya Alam dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian

© Mohamad Shohibuddin
All rights reserved

Desain sampul:
Ki Agus Iqbal

Sumber foto:
Dokumentasi Mohamad Shohibuddin

Tata letak isi:
Iib

Cetakan pertama, Juni 2024
x + 61 hlm; 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-51260-7-9

Diterbitkan oleh:

Sajogyo Institute (SAINS)
Jalan Malabar No.22 Bogor
Jawa Barat 16151, Indonesia
Telp./Fax. +62 251 8374048
Email: eksekutif@sajogyo-institute.org
https://sajogyo-institute.org/

PERSEMBAHAN

Untuk warga Sesongo, perempuan dan lelaki
yang meninggal, terusir, dan tetap bertahan

INSTITUT PERTANIAN
BOGOR

PENGANTAR KETUA DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA IPB

Menurut Bank Dunia, Indonesia dinyatakan sebagai negara berpendapatan menengah atas berdasarkan perhitungan Grass National Income (GNI) per kapita. Pada 1 Juli 2023, peringkat ini berhasil dicapai kembali oleh Indonesia setelah sempat melorot ke peringkat menengah selama pandemi Covid-19.

Namun, di tengah optimisme makro ini, ternyata "harga" yang harus dibayar sangat mahal. Capaian pertumbuhan ekonomi nasional semacam ini disumbang dalam jumlah sangat besar oleh sektor sumber daya alam, baik yang bersifat terbarukan seperti perkebunan atau ekstraktif seperti tambang. Pertalian erat sektor sumber daya alam dengan struktur oligarki lokal dan nasional menyebabkan tata kelola sektor ini sangat buruk. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi di sektor ini, bahkan menduduki peringkat atas di antara kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber daya alam adalah bagian dari sumber-sumber agraria yang menurut mandat UUD 1945 harus dikelola negara dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, kenyataan sering kali justru menunjukkan hal sebaliknya. Berita yang beredar di media massa atau media sosial justru banyak tentang penggusuran rakyat oleh proyek-proyek investasi para pemodal besar yang dengan mudah dapat menguasai tanah dalam skala luas. Bukan hanya penggusuran,

proyek-proyek investasi ini tak jarang menimbulkan kerusakan ekologis yang parah. Dampak buruk dari kerusakan ekologis ini bahkan sering dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Kondisi demikian menurut penulis buku ini mencerminkan *environmental insecurity*, suatu situasi di mana lingkungan dan sumber daya alam menjadi sumber ancaman yang serius bagi keamanan manusia (*human security*). Melalui survei literatur yang cukup luas, penulis buku ini mengkaji dalam kondisi apa dan dengan mekanisme bagaimana sumber daya alam dapat menjadi faktor risiko terjadinya *human insecurity*, termasuk dalam bentuk konflik yang disertai kekerasan.

Yang menarik, penulis buku ini juga menelusuri literatur yang menunjukkan peran sebaliknya dari sumber daya alam, yaitu sebagai faktor peluang bagi perdamaian dan keadilan. Hal ini sangat relevan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan sumber daya alam menjadi aset produktif untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kami menyambut gembira dan sangat mendukung penerbitan buku ini. Survei teoritis tentang peran sumber daya alam dalam dinamika konflik dan perdamaian yang disajikan dalam buku ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini. Apalagi hal ini kemudian digunakan dengan baik sebagai acuan untuk menganalisis konflik dan perdamaian di Aceh maupun untuk mengembangkan kurikulum mata kuliah di IPB.

Semoga buku ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang peduli pada tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang adil serta menjamin keamanan dan keselamatan rakyat.

Bogor, 18 Juni 2024

Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si

PRAKATA PENULIS

Buku ini adalah risalah sederhana yang sejarah penulisannya memiliki riwayat cukup panjang. Ia bermula dari presentasi penulis pada diskusi yang diadakan oleh Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) IPB pada 6 Februari 2020. Sebagian substansi presentasi ini sebetulnya merupakan materi yang lebih dulu penulis siapkan untuk lokakarya penyusunan kurikulum mata kuliah "Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian". Ini adalah mata kuliah baru yang mulai diberikan pada semester genap tahun akademik 2020-2021 untuk mahasiswa semester 6 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB yang mengambil peminatan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan (TKSDAL).

Meskipun demikian, transformasi presentasi lisan tersebut ke dalam bentuk tulisan naratif barulah penulis lakukan pada Juni 2020 sebagai tulisan persembahan untuk melepas purnabakti Dr. Soeryo Adiwibowo, senior dan guru penulis di IPB. Setelah tersimpan lama tanpa diterbitkan, naskah ini setelah melalui revisi minor akhirnya terbit secara terbatas pada September 2023 sebagai Working Paper Sajogyo Institute, Vol. 3, No. 3. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun menyumbang gagasan pada penulis selama proses penulisan ini.

Buku kecil ini adalah penulisan ulang naskah Working Paper tersebut dalam bentuk yang lebih terstruktur dan elaboratif. Tujuan penyusunan buku ini tidak terlepas dari tugas penulis selaku koordinator mata kuliah "Sumber Daya Alam, Keadilan

dan Perdamaian". Setelah mata kuliah ini disampaikan selama empat tahun terakhir ini, semakin dirasakan kebutuhan untuk menyediakan bacaan yang singkat dan padat mengenai topik-topik perkuliahan sebagai rujukan utama bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Hal ini karena belum ada literatur berbahasa Indonesia yang membahas topik ini secara khusus.

Di luar target pembaca yang spesifik ini, tentu saja substansi yang dibahas dalam buku ini dipandang relevan bagi kalangan yang lebih luas. Sebab, jika dicermati, kebanyakan kasus-kasus konflik di Indonesia berkaitan erat dengan faktor sumber daya alam. Sebagai misal, catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria secara rutin melaporkan kecenderungan peningkatan konflik agraria di tanah air dalam berbagai sektornya. Konflik-konflik ini tidaklah bersifat individual dan sporadis, melainkan sistematis dan struktural.

Konsekuensi dari konflik-konflik ini juga tidak sederhana dan bersifat lokal. Masih segar ingatan kekerasan konflik komunal yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia, seperti Sambas, Poso, dan Ambon. Sesuatu yang awalnya dilatari perkelahian remaja berkembang menjadi konflik komunal yang sangat kejam setelah sentimen etnis dan agama mulai dikobarkan. Padahal, apabila dicermati lebih mendalam, konflik ini sebenarnya berakar pada disparitas ekonomi di antara beberapa kelompok masyarakat akibat ketimpangan akses atas sumber daya alam maupun atas aset-aset produktif lainnya.

Bukan saja mengoyak jalinan harmoni sosial antar kelompok masyarakat, konflik terkait sumber daya alam ini lebih jauh juga dapat mengancam ikatan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal ini pernah terjadi dalam kasus etnonasionalisme di Aceh yang kebangkitannya tidak lepas dari eksploitasi kekayaan alam minyak dan gas di Aceh, namun manfaatnya sedikit sekali yang

dirasakan rakyat Aceh sendiri. Syukurlah, konflik separatisme di Aceh ini akhirnya dapat diselesaikan melalui perundingan damai, meski sebelumnya harus melewati tiga dekade sejarah perang yang menyita korban jiwa dan harta yang sangat besar. Hal ini belum termasuk periode konflik yang sebelumnya terjadi di ujung terbarat wilayah Indonesia ini, yaitu Perang Cumbok di paruh kedua era 1940-an dan pemberontakan Darul Islam pada dekade 1950-an.

Dengan sejarah panjang konflik dan perdamaian di berbagai penjuru Nusantara ini, patut dipertanyakan sejauh manakah pemerintah bersedia belajar dari kesemua peristiwa ini untuk, sebagai misal, menempuh pendekatan berbeda dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata di Papua? Sejauh mana pula pemerintah bersedia memetik hikmah dari berbagai peristiwa kekerasan itu untuk menjalankan paradigma pembangunan yang berbeda, yaitu pembangunan yang lebih sensitif konflik dan mengutamakan pencapaian *human security* pada semua aspeknya (sesuai definisi UNDP, mencakup: keamanan personal, komunitas, politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pangan). Dan bukan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Demikianlah, dengan menempatkan pokok bahasan buku ini pada pergulatan riil yang dihadapi bangsa Indonesia, penulis berharap apa yang disajikan dalam buku ini dapat memantik kepedulian banyak pihak untuk memastikan agar sumber daya alam di Indonesia dapat berperan sebagai sumber keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan. Semoga!

Bogor, 16 Juni 2024

Mohamad Shohibuddin

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

DAFTAR ISI

Persembahan ☙ *iii*
Pengantar Ketua Departemen SKPM, Fakultas Ekologi Manusia IPB ☙ *v*
Prakata Penulis ☙ *vii*

1. Pendahuluan ☙ *1*
2. Kelangkaan Sumber Daya Alam sebagai Faktor Risiko Konflik ☙ *5*
3. Kelimpahan Sumber Daya Alam sebagai Faktor Risiko Konflik ☙ *13*
4. Dampak Konflik pada Lingkungan dan Sumber Daya Alam ☙ *23*
5. Peran Sumber Daya Alam sebagai Faktor Peluang Perdamaian ☙ *27*
6. Penerapan Kerangka Teori untuk Analisis Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh ☙ *35*
7. Penerapan Kerangka Teori untuk Pengembangan Kurikulum Mata Kuliah ☙ *47*
8. Penutup ☙ *53*

Bibliografi Terpilih ☙ *55*
Biografi Singkat Penulis ☙ *61*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Faktor Sumber Daya Alam dengan Konflik dan *Human Security* ☙ *5*

Gambar 2.2. Dua Pandangan mengenai Kelangkaan SDA sebagai Faktor Risiko Terjadinya Konflik ☙ *6*

Gambar 2.3. Hubungan Tingkat Curah Hujan dengan Intensitas Konflik di Darfur, Sudan ☙ *8*

Gambar 2.4. Konflik Akibat Kelangkaan SDA Menurut Homer-Dixon ☙ *9*

Gambar 3.1. Fenomena Kutukan SDA di Indonesia: Kemiskinan Tinggi di Daerah Kaya Migas ☙ *15*

Gambar 3.2. Kutukan SDA pada Sektor Tambang di Kalimantan Timur ☙ *16*

Gambar 3.3. Kerangka Penjelasan Konflik Menurut Karakteristik SDA ☙ *17*

Gambar 3.4. Peran Kelimpahan SDA pada Separatisme di Sudan ☙ *20*

Gambar 3.5. Kaitan antara Kondisi Ketersediaan SDA dengan Berbagai Manifestasi Konflik ☙ *21*

Gambar 4.1. Dampak Kerusakan Green House dan Lahan Pertanian Akibat Bombardemen Israel ☙ *24*

Gambar 4.2. Korban Luka dan Meninggal Akibat Perang Gaza ☙ *26*

Gambar 5.1. Transformasi Peran SDA dari Faktor Risiko Konflik Menjadi Faktor Peluang Perdamaian ☙ *28*

Gambar 5.2. Seri *Environmental Peacebuilding* Terbitan UNEP ☙ *29*
Gambar 5.3. Seri *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resource Conflict* Terbitan UNEP ☙ *30*
Gambar 5.4. Panduan untuk Sumber Daya Alam Ekstraktif ☙ *31*
Gambar 5.5. Panduan untuk Sumber Daya Alam Terbarukan ☙ *32*
Gambar 5.6. Panduan untuk Sumber Daya Alam Berupa Tanah ☙ *33*
Gambar 5.7. Panduan Kebijakan Ekonomi Makro Berbasis SDA ☙ *34*
Gambar 6.1. Kerangka Pemikiran untuk Memahami Peran SDA dalam Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh ☙ *36*
Gambar 6.2. Peran SDA dalam Berbagai Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh ☙ *37*
Gambar 6.3. Peran SDA dalam Proses Perdamaian dan Pembangunan Pasca-Konflik di Aceh ☙ *40*
Gambar 7.1. Tujuh Dimensi Keamanan Insani Menurut UNDP ☙ *49*
Gambar 7.2. Faktor Lingkungan dalam Siklus Konflik dan Perdamaian ☙ *50*

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. SDA sebagai Faktor Risiko Konflik di Berbagai Negara ☙ *13*

Tabel 7.1. Topik dan Pokok Bahasan pada Mata Kuliah "Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian" ☙ *51*

1

PENDAHULUAN

Dalam studi konflik dan perdamaian, faktor sumber daya alam selalu mendapatkan tempat tersendiri karena perannya yang bersifat mendua. Di satu sisi, sumber daya alam dapat menjadi sumber ketegangan sosial dan bahkan faktor pemicu konflik. Di sisi yang lain, sumber daya alam juga dapat menjadi landasan membangun perdamaian sekaligus menjaga keberlanjutannya. Lebih jauh, faktor sumber daya alam dalam studi pembangunan juga diperhitungkan sebagai salah satu kepedulian utama dalam pengembangan pembangunan yang waspada konflik (*conflict-sensitive development*). Hal ini tidak lepas dari kesadaran bahwa proses pembangunan, khususnya yang terkait dengan sumber daya alam, tidak boleh melahirkan konflik; sebaliknya, justru harus dapat menjamin terpenuhinya berbagai aspek keamanan insani (*human security*).

Menyadari demikian penting peran yang dapat dimainkan oleh sumber daya alam, maka dalam buku kecil ini hendak disajikan survei teoritis atas sejumlah literatur yang menjelaskan peran strategis sumber daya alam ini, baik sebagai faktor kunci dalam dinamika konflik maupun dalam berbagai upaya perdamaian. Sejumlah literatur dari berbagai sudut pandang teoritis akan dipaparkan secara ringkas untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana kaitan (*nexus*) antara faktor sumber daya alam dengan kemunculan konflik, dengan proses perdamaian dan dengan pembangunan pasca-konflik. Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan penulisan buku ini adalah

untuk sekedar menyajikan survei teoritis secara ringkas tanpa berpretensi untuk melahirkan sintesis teoritis tertentu.

Lima pertanyaan pemandu diajukan untuk mengarahkan alur pembahasan dalam buku ini.

1. Dalam kondisi apa dan bagaimana suatu sumber daya alam dapat menjadi faktor risiko (*risk factor*) yang meningkatkan peluang meletupnya konflik yang disertai dengan kekerasan (*violent conflict*)?
2. Apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh dinamika konflik yang terjadi terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam, dan sejauh mana hal ini menjadi bagian dari strategi perang itu sendiri?
3. Bagaimanakah sumber daya alam dapat ditransformasikan dari semula merupakan faktor risiko menjadi faktor peluang (*opportunity factor*), yakni sebagai dasar bagi upaya-upaya penyelesaian konflik, perdamaian dan pembangunan pasca-konflik?
4. Bagaimanakah kerangka teoritis tentang peran sumber daya alam ini dapat dijadikan acuan untuk memahami dinamika konflik dan perdamaian di Indonesia, misalnya di Aceh?
5. Bagaimanakah kerangka teoritis tentang peran sumber daya alam ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan mata kuliah yang relevan di perguruan tinggi, misalnya di Institut Pertanian Bogor?

Berdasarkan pertanyaan pemandu di atas, sistematika tulisan ini terdiri atas empat pokok bahasan sebagai berikut. Pertama-tama akan dibahas terlebih dahulu beberapa pandangan teoritis tentang sumber daya alam sebagai faktor risiko. Untuk itu, pada Bab 2 dan Bab 3 secara berturut-turut akan dibahas peran yang dimainkan oleh faktor sumber daya alam, baik dalam kondisi

kelangkaan maupun kelimpahannya, dalam memicu terjadinya konflik berskala besar di berbagai negara.

Selanjutnya, Bab 3 akan membahas dampak yang ditimbulkan oleh konflik pada lingkungan dan sumber daya alam maupun penggunaannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi perang yang dijalankan. Ada dua kasus yang dibahas pada bab ini, yaitu strategi perang yang dilakukan oleh US pada Perang Vietnam selama 1961-1971 dan oleh Israel pada Perang Gaza yang berlangsung saat ini. Skala dampak yang ditimbulkan oleh dua perang ini pada lingkungan dan sumber daya alam begitu besar sehingga menyebabkan keduanya dijuluki sebagai "Ecocide".

Bab 4 akan memaparkan bagaimana peran negatif sumber daya alam ini dapat ditransformasikan dari semula sebagai pemicu konflik menjadi faktor peluang perdamaian. Hal ini diupayakan dengan menjadikan sumber daya alam sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik, mewujudkan proses perdamaian serta menjalankan pembangunan pasca-konflik

Dua pembahasan yang terakhir akan memaparkan penerapan kerangka teoritis yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu pada konteks di Indonesia. Untuk itu, pada Bab 5 akan dibahas kasus dinamika konflik dan perdamaian di Aceh berdasarkan kerangka teoritis tersebut. Selanjutnya, pada Bab 6 akan dibahas penggunaan kerangka teoritis ini sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mata kuliah *Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian* yang diberikan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. [ ]

2

KELANGKAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI FAKTOR RISIKO KONFLIK

Terdapat dua pandangan teoritis yang saling berlawanan dalam melihat peran sumber daya alam sebagai pemicu konflik yang disertai kekerasan (*violent conflict*). Pandangan pertama melihat kondisi kelangkaan (*scarcity*) maupun kemerosotan (*depletion*) suatu sumber daya alam sebagai faktor risiko (*risk factor*) yang dapat memicu terjadinya konflik dan ketidakamanan insani (*human insecurity*). Pandangan yang kedua justru menekankan kondisi sebaliknya, yaitu bahwa keberadaan sumber daya alam dalam kondisi yang melimpah (*resource abundance*) merupakan faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik dan *human insecurity*.

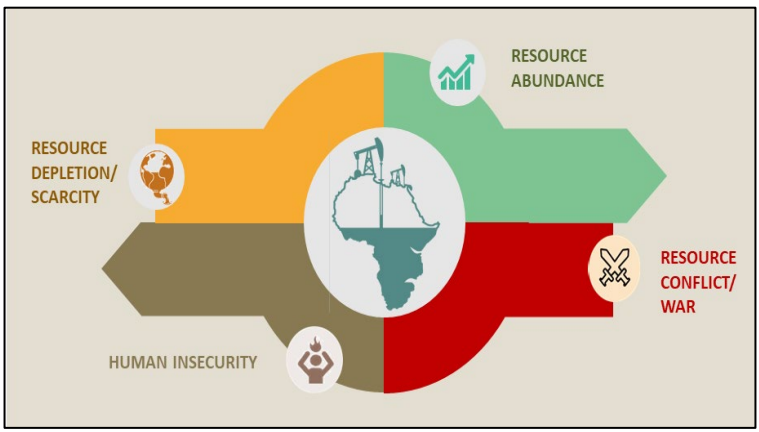

Gambar 2.1. Hubungan Faktor Sumber Daya Alam dengan Konflik dan *Human Insecurity*

Dalam kenyataannya, kedua kondisi sumber daya alam tersebut (kelangkaan maupun kelimpahan) sama-sama dapat memicu munculnya konflik yang disertai kekerasan, sekalipun dengan karakteristik yang berlainan (Gambar 2.1). Di satu sisi, terdapat banyak konflik yang meledak di seputar persaingan yang keras dalam memperebutkan sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas atau yang kuantitas dan kualitasnya mengalami kemerosotan. Begitu pula, terdapat banyak konflik yang justru meledak pada kondisi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja di situ terdapat ketidakadilan dalam akses dan distribusi manfaatnya.

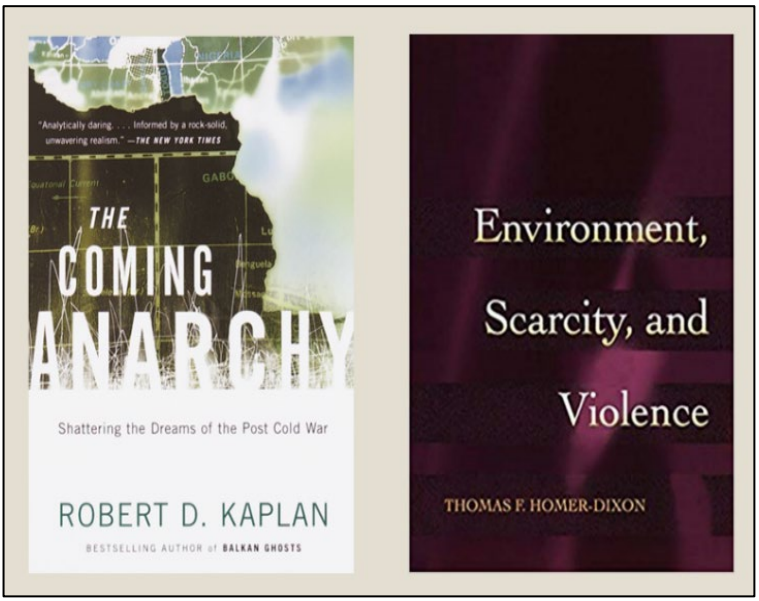

Gambar 2.2. Dua Pandangan mengenai Kelangkaan SDA Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Konflik

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2, salah satu publikasi awal yang mewakili pandangan pertama adalah artikel yang ditulis Robert D. Kaplan dengan judul *The Coming Anarchy*. Artikel ini

meramalkan bahwa seiring dengan peningkatan populasi dunia yang melonjak tinggi, sementara ketersediaan sumber daya alam semakin menipis, maka umat manusia akan dihadapkan pada ancaman anarki. Ketika pertama kali terbit pada 1994, karya "provokatif" Kaplan ini sangat menggemparkan dan bahkan sempat disejajarkan dengan dua karya "nujuman" lain pada periode yang sama, yakni *Clash of Civilizations* karya Samuel P. Huntington dan *The End of History and the Last Man* karya Francis Fukuyama. Artikel ini kemudian dikembangkan Kaplan menjadi buku dengan judul yang sama dan terbit pada tahun 2000.

Namun, secara akademik, teoritisasi yang lebih mendalam atas peran kelangkaan sumber daya alam sebagai pemicu konflik ini dilakukan Thomas F. Homer-Dixon dalam karya seminalnya *Environment, Scarcity, and Violence* yang terbit pada tahun 1999. Homer-Dixon mengajukan satu model penjelasan yang lebih kompleks, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian bawah nanti.

Ilustrasi dari pandangan pertama ini dapat dicontohkan pada konflik etnis di Darfur, wilayah barat Sudan, yang baru berakhir setelah penandatanganan perjanjian damai yang komprehensif pada 31 Agustus 2020. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3, fluktuasi insiden konflik selama kurun waktu 1950 hingga 1990 di Darfur ternyata sangat terkait dengan tinggi-rendahnya curah hujan yang turun pada periode bersamaan. Demikianlah, ketika tingkat curah hujan ini terus menurun semenjak dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an, maka pada periode itu terjadi pula laju peningkatan konflik yang sangat tajam. Kasus konflik di Darfur ini menyajikan satu contoh yang menarik mengenai hubungan antara kelangkaan sumber daya alam (dalam hal ini

adalah air yang amat berharga di daerah gurun pasir) dengan peningkatan kompetisi di antara para pengguna sumber daya yang sangat langka ini. Kompetisi ini, dalam konteks ketegangan antara warga etnis Arab dan non-Arab di Darfur, pada akhirnya memicu konflik dengan kekerasan yang berdimensi komunal.

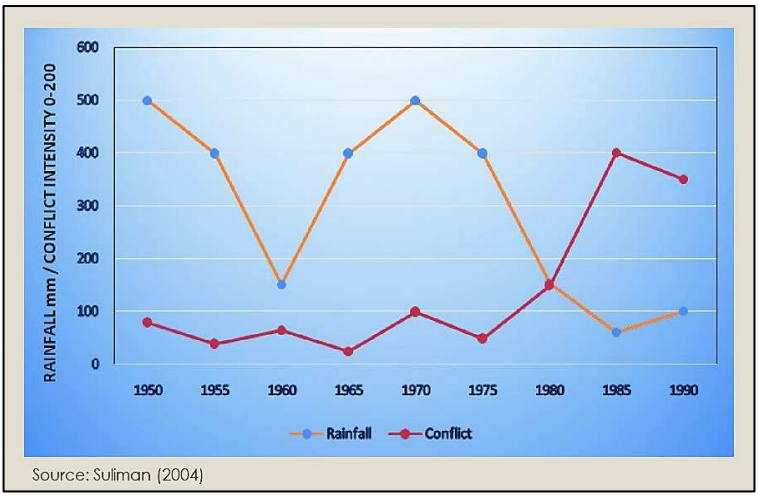

Gambar 2.3. Hubungan Tingkat Curah Hujan
dengan Intensitas Konflik di Darfur, Sudan, 1950-1990

Sekalipun demikian, hubungan kausalitas yang terjadi antara faktor kelangkaan sumber daya alam ini dengan insiden konflik yang disertai kekerasan tidak berlangsung sesederhana seperti digambarkan di atas. Berdasarkan perbandingan atas sejumlah kasus konflik di berbagai negara, Homer-Dixon sampai pada kesimpulan bahwa hubungan antara faktor kelangkaan sumber daya alam dengan kemunculan konflik tidak bersifat linier dan deterministik semacam ini, melainkan jauh lebih kompleks. Hal ini dijelaskan Homer-Dixon dengan membedakan tiga jenis kelangkaan sebagai berikut: (1) kelangkaan yang ditimbulkan oleh keterbatasan pasokan, (2) kelangkaan yang ditimbulkan

oleh peningkatan permintaan, dan (3) kelangkaan yang lebih bersifat struktural (Gambar 2.4).

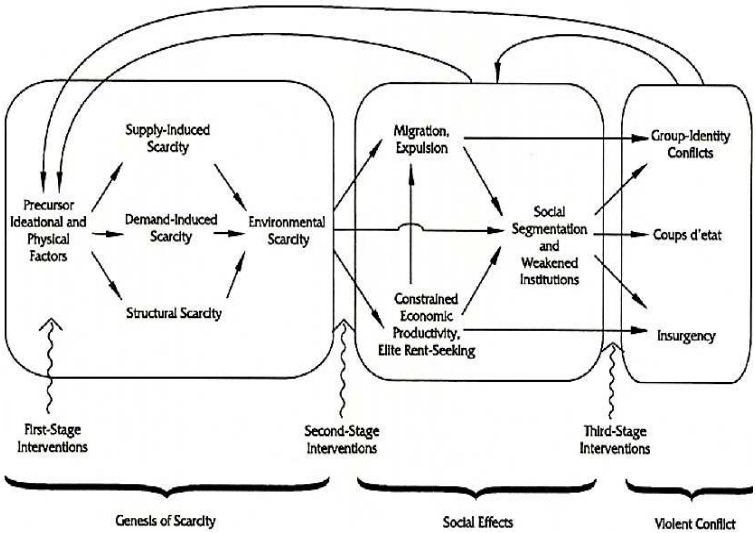

Gambar 2.4. Konflik Akibat Kelangkaan SDA Menurut Homer-Dixon

Seperti dapat dicermati pada Gambar 2.4, model teoritis Homer-Dixon jauh lebih komprehensif yang mencakup tiga kelompok variabel yang saling memengaruhi berikut ini. Pertama adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan asal-usul kelangkaan sumber daya alam (*genesis of scarcity*). Kedua adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan berbagai dampak sosial (*social effects*) yang dapat ditimbulkan oleh kelangkaan sumber daya alam tersebut. Ketiga adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan berbagai jenis konflik dengan kekerasan yang dapat ditimbulkan oleh kedua kelompok variabel yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan Gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan secara ringkas bahwa sumber kelangkaan sumber daya alam dapat dipicu oleh sisi *supply*, yakni pasokan sumber daya alam yang memang

semakin menipis, misalnya saja kondisi curah hujan yang terus menurun. Atau bisa juga ia dipicu oleh *demand* yang semakin meningkat terhadap sumber daya alam tertentu, apalagi jika di situ terdapat situasi *open access.* Dalam kondisi demikian, maka kelangkaan pun terjadi karena daya dukung alam yang tidak dapat lagi memenuhi peningkatan *demand* yang tak terkendali. Akhirnya, terdapat satu jenis kelangkaan sumber daya alam yang lebih bersifat struktural (*structural scarcity*). Sebenarnya, di sini ketersediaan sumber daya alam cukup memadai, bahkan boleh jadi berlebih, namun terjadi kondisi ketidakadilan alokasi dan distribusi sumber daya alam tersebut sehingga kemudian menimbulkan masalah kelangkaan. Ketiga faktor kelangkaan inilah yang secara terpisah atau bersama-sama menjadi sumber penyebab terjadinya *environmental scarcity*.

Uraian di atas adalah satu kelompok variabel di dalam model Homer-Dixon yang menjelaskan asal-usul kelangkaan sumber daya alam. Dari sini lalu terjadi rangkaian dampak sosial yang dalam model Homer-Dixon merupakan satu kelompok variabel tersendiri. Sebagai misal, kelangkaan sumber daya alam dapat memicu migrasi keluar, bahkan juga pengusiran atas kelompok minoritas, ketika terjadi kompetisi atas sumber daya alam yang terbatas. Di Australia, misalnya, pasca kebakaran hutan yang sangat luas belum lama ini, banyak onta yang sengaja dibunuh karena populasinya terlalu banyak sehingga memicu persaingan dengan manusia dalam konsumsi air. Tetapi di Darfur, seiring curah hujan yang semakin kecil, kelangkaan air telah memicu terjadinya kompetisi di antara manusia yang, dihadapkan pada fakta keragaman etnis dan agama, telah berujung pada konflik komunal. Pada akhirnya, hal ini juga menyebabkan pelemahan institusi sehingga negara sehingga tidak mampu menjalankan fungsi memberikan perlindungan keamanan bagi warganya.

Kombinasi dari kesemua dampak sosial itu kemudian berujung pada konflik skala luas yang disertai dengan kekerasan. Konflik ini makin berpeluang terjadi dalam konteks masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan identitas, seperti etnis dan agama. Selain itu, konflik berskala luas ini juga dapat berupa kudeta golongan militer terhadap pemerintah yang sah. Kemungkinan manifestasi lain dari konflik berskala luas ini adalah meluasnya aspirasi separatisme yang kemudian dapat melahirkan gerakan pemberontakan bersenjata. Berbagai tipe konflik yang disertai kekerasan inilah yang menjadi kelompok variabel terakhir di dalam model Homer-Dixon.

Dewasa ini isu kelangkaan sumber daya alam makin mencuat dalam konteks perubahan iklim yang berlangsung pada skala global. Perubahan iklim global ini telah mengakibatkan banyak dampak lingkungan, seperti kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kekeringan, banjir, puting beliung, dan lain sebagainya. Seiring meluasnya berbagai dampak lingkungan itu, maka akses terhadap tanah, air bersih, pangan dan sebagainya menjadi semakin kompetitif. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu terjadinya konflik berskala luas yang sering disertai pula dengan fenomena *environmental refugees* (pengungsian lintas negara yang dipicu oleh peristiwa bencana alam).

Sejalan dengan itu, dewasa ini muncul pula isu *depletion*, yakni semakin menipisnya cadangan kekayaan alam suatu negara. Sebagai contoh, cadangan minyak di Arab Saudi diperkirakan hanya tersisa untuk 50 tahun lagi, dan kondisi ini sedikit banyak berpengaruh pada peningkatan ketegangan geopolitik yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah. Berbagai kondisi ini apabila tidak mampu ditangani dengan baik akan melahirkan

konflik regional yang semakin luas pada masa-masa yang akan datang. []

3

KELIMPAHAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI FAKTOR RISIKO KONFLIK

Sumber daya alam sebagai faktor risiko bagi terjadinya konflik ternyata tidak saja dipicu oleh kondisi kelangkaan sumber daya alam atau kemerosotannya. Memang, terdapat situasi di mana kelangkaan sumber daya alam dapat menjadi faktor kunci yang memicu terjadinya konflik, seperti persaingan atas tanah dan air yang mendasari konflik di Palestina dan Kashmir (lihat panah pada Tabel 3.1).

Tabel 3.1. SDA sebagai Faktor Risiko Konflik di Berbagai Negara

Region	Participants	Date	Resources
Cabinda	Angola, Congo	1975	oil
Congo War	DRC, Chad, Namibia, Rwanda, Angola, Zimbabwe, Uganda, Burundi, Sudan	1990s	minerals, diamonds, timber
Kashmir	India, Pakistan	1947	water
Palestine	Israel, Palestine	2007	water
Baluchistan	Pakistan, Iran	2004	natural gas
Somali civil war	Somalia, US, UK	1991	oil
Afghanistan	Afghanistan, US + allies	1980	gems, gold, copper, coal, opium, natural gas
Iraq	Iraq, US + allies	2001	oil, natural gas, phosphates, sulphur

Sumber: Course on Economics of the Natural Resource Trap (2015)

Tetapi, apabila Tabel ini diperhatikan dengan lebih teliti, konflik berskala besar justru lebih banyak terjadi di negara-negara yang

mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat disaksikan misalnya pada kasus perang di Cabinda dan Somalia (konflik terkait minyak), Baluchistan (konflik terkait gas), Kongo (konflik terkait berlian, mineral, dan kayu), Irak (konflik terkait minyak dan gas), dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berlawanan dari pandangan pertama, faktor kelimpahan sumber daya alam inilah yang menjadi penekanan dalam pandangan teoritis yang kedua. Berbagai literatur dalam pandangan terakhir ini menyatakan bahwa kelangkaan sumber daya alam bukan faktor utama yang memicu konflik. Alih-alih, banyak kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa pemicu konflik berskala besar yang jauh lebih menonjol adalah kondisi yang sebaliknya, yakni situasi di mana sumber daya alam justru tersedia cukup melimpah. Hal inilah yang kemudian mendasari konseptualisasi atas apa yang dikenal sebagai *resource curse* atau "kutukan sumber daya alam".

Namun, pengertian *resource curse* yang dimaksud di sini tidak terbatas pada fenomena konflik dengan kekerasan di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Lebih dari itu, ia juga mengacu pada aneka eksternalitas negatif lainnya, seperti angka kemiskinan yang tinggi, kegagalan tata kelola berbagai institusi publik, dan juga merebaknya korupsi di negara-negara atau daerah-daerah penghasil kekayaan alam bernilai tinggi. Sebagai ilustrasi, banyak kabupaten penghasil minyak dan gas (migas) di Indonesia, seperti Kabupaten Bojonegoro dan Musi Banyuasin (Gambar 3.1), justru ditandai oleh tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata angka nasional. Hal ini merupakan sebuah ironi tersendiri karena daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah justru masih dibelit oleh masalah kemiskinan yang cukup akut.

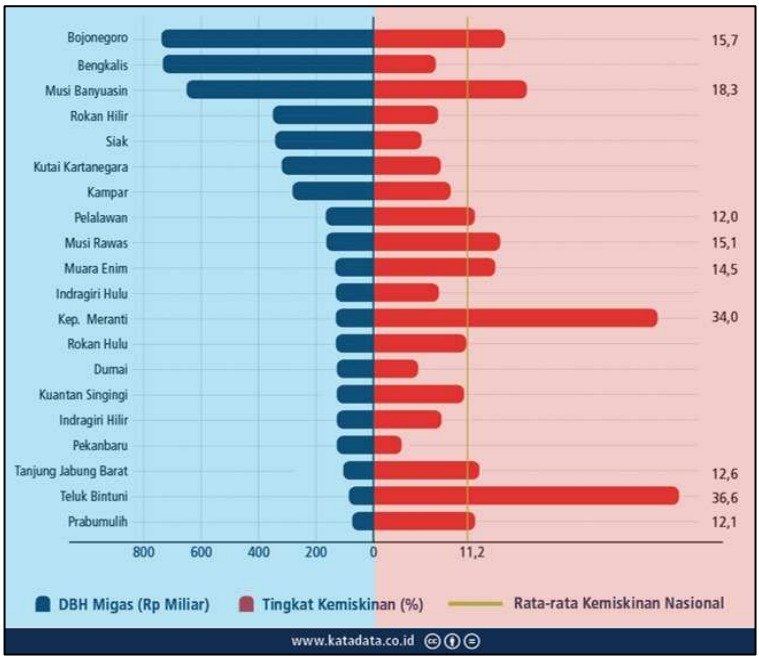

Gambar 3.1. Fenomena Kutukan SDA di Indonesia:
Kemiskinan Tinggi di Daerah Kaya Migas (Sumber: Katadata)

Selain memiliki angka kemiskinan tinggi, beberapa kabupaten di Indonesia yang memiliki kekayaan batu bara yang melimpah juga ditandai oleh bencana ekologis yang cukup parah. Banyak sekali lubang bekas galian tambang batu bara yang dibiarkan terbuka begitu saja tanpa dilakukan reklamasi sesuai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur saja terdapat paling tidak 1.735 lubang bekas galian tambang batu bara yang dibiarkan menganga sehingga mengancam keselamatan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Sepanjang tahun 2011 hingga 2018 saja, tercatat tidak kurang dari 32 jiwa yang meninggal dunia karena tenggelam di kolam-kolam raksasa akibat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka ini (Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Kutukan SDA pada Sektor Tambang di Kalimantan Timur

Pada saat yang sama, seperti terlihat pada Gambar 3.2, kenyataan menunjukkan persinggungan erat antara industri batu bara ini dengan dinamika politik nasional dan daerah. Sebagai contoh, salah satu isu kunci yang ramai dibicarakan selama Pemilihan Presiden 2019 adalah dukungan finansial dari para pengusaha tambang. Seperti ditunjukkan oleh laporan investigasi Tempo, dukungan finansial ini ternyata sama-sama mengalir ke kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tentu saja, aliran dana yang melimpah ini tidak bersifat cuma-cuma. Buktinya, tak lama setelah Presiden Jokowi terpilih lagi untuk periode kedua, terbit UU Cipta Kerja yang menyediakan karpet merah kepada para pengusaha tambang (Koran Tempo, 20/1/2020). Perlakuan istimewa ini antara lain dalam bentuk proses perpanjangan kontrak tambang yang tanpa lelang dan tanpa keharusan penciutan lahan serta penghapusan prioritas

bagi BUMN dan BUMD untuk mengambil alih kontrak tambang. Pada kenyataannya, perlakuan istimewa ini sebenarnya adalah cerminan dari *weakened institutions*, yaitu pelemahan institusi-institusi negara karena tersandera oleh oligarki tambang.

Apabila dicermati, studi yang menekankan kelimpahan sumber daya sebagai pemicu konflik ini memberi perhatian besar pada dua isu kunci berikut. Pertama adalah karakteristik dari sumber daya alam yang menjadi pokok pertaruhan dalam konflik. Kedua adalah motivasi dari para aktor yang terlibat dalam konflik yang terkait sumber daya alam (Gambar 3.3).

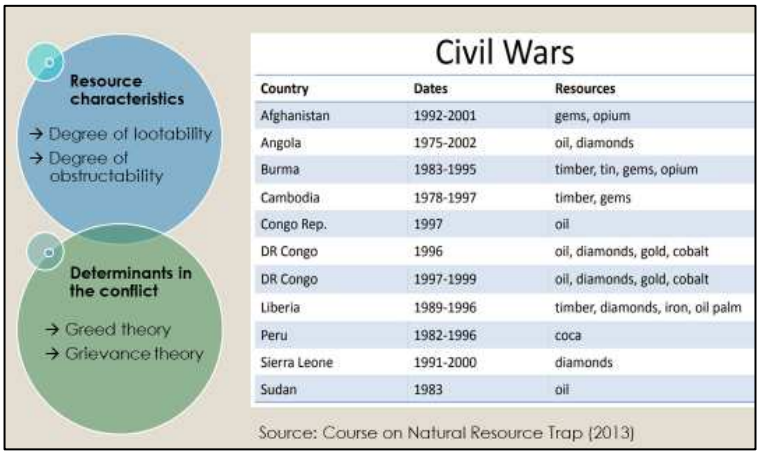

Civil Wars

Country	Dates	Resources
Afghanistan	1992-2001	gems, opium
Angola	1975-2002	oil, diamonds
Burma	1983-1995	timber, tin, gems, opium
Cambodia	1978-1997	timber, gems
Congo Rep.	1997	oil
DR Congo	1996	oil, diamonds, gold, cobalt
DR Congo	1997-1999	oil, diamonds, gold, cobalt
Liberia	1989-1996	timber, diamonds, iron, oil palm
Peru	1982-1996	coca
Sierra Leone	1991-2000	diamonds
Sudan	1983	oil

Source: Course on Natural Resource Trap (2013)

Gambar 3.3. Kerangka Penjelasan Konflik Menurut Karakteristik SDA

Dalam isu pertama, karakteristik dari sumber daya alam dilihat berdasarkan sejauh mana tingkat kemudahan atau, sebaliknya, hambatan di dalam eksploitasinya. Ada jenis-jenis sumber daya alam yang memang mudah dieksploitasi tanpa membutuhkan teknologi yang canggih, seperti berlian yang banyak terdapat di sejumlah negara di Afrika atau emas di Indonesia. Namun, ada beberapa jenis sumber daya alam yang eksploitasinya memang sulit dan menuntut penggunaan teknologi yang tinggi, seperti

minyak dan gas. Batu bara sebenarnya adalah bahan tambang yang teknologi eksploitasinya tidak sekompleks pada minyak dan gas, namun tetap saja hal itu terlalu mahal untuk mampu dilakukan oleh rakyat kebanyakan.

Perbedaan dalam corak teknologi eksploitasi sumber daya alam ini ternyata dapat memicu dinamika dan karakter konflik yang berbeda pula. Apabila suatu sumber daya alam secara teknologi mudah dieksploitasi, maka konflik yang muncul kebanyakan bersifat horizontal antar kelompok masyarakat. Hal ini karena setiap kelompok dapat mengambilnya dengan mudah sehingga memicu kompetisi yang sangat keras di antara mereka sendiri. Di beberapa negara penghasil berlian di Afrika, misalnya Sierra Leone, kelompok-kelompok yang terlibat penambangan berlian mampu mempersenjatai diri untuk mengontrol lokasi-lokasi yang diperebutkan. Karena harga berlian yang sangat mahal, maka pendapatan dari perdagangan ilegal komoditas ini dapat digunakan untuk membeli senjata api dari pasaran gelap baik dalam rangka membela diri maupun untuk menumpas pihak lawan. Dari sinilah muncul sebutan "*the blood diamond*" yang menggambarkan peran sumber daya alam sebagai faktor risiko konflik.

Apabila dirinci lebih lanjut, terdapat tiga aspek faktor risiko di balik fenomena "*the blood diamond*" ini. Pertama, upaya pihak-pihak yang bersaing untuk mengontrol dan mengakses wilayah yang mengandung berlian telah berkontribusi pada meletupnya konflik. Kedua, begitu konflik meledak, pendapatan melimpah dari berlian digunakan untuk membeli persenjataan, menggaji personel militer, dan menguasai teritori yang dianggap bernilai strategis. Ketiga, prospek penghentian konflik dan perwujudan perdamaian dapat dihambat oleh beberapa aktor atau faksi yang

pendapatannya dari berlian akan terancam jika konflik diakhiri dan kondisi perdamaian dipulihkan.

Ketiga hal inilah yang menjelaskan mengapa upaya penyelesaian konflik dan kesepakatan damai sering kali sulit diwujudkan pada kasus-kasus konflik yang dipicu oleh sumber daya alam bernilai tinggi yang melimpah dan sekaligus mudah dieksploitasi. Untuk merespons hal ini, pihak konsumen di negara Barat kemudian menginisiasi mekanisme sertifikasi untuk memastikan bahwa berlian yang diimpor tidak berasal dari wilayah-wilayah konflik atau bersih dari situasi konflik (dikenal dengan the Kimberley Process).

Sebaliknya, jika eksploitasi suatu sumber daya alam menuntut investasi yang besar dan teknologi yang tinggi seperti migas, maka kecenderungan yang terjadi adalah konflik vertikal, yaitu berlangsung antara masyarakat dengan negara. Di Indonesia, konflik vertikal ini bahkan ada yang memuncak dalam bentuk gerakan separatisme bersenjata, misalnya di Aceh dan Papua. Memang, tidak semua kasus di Indonesia berakhir pada kondisi semacam ini. Sebagai misal, meski Kalimantan Timur memiliki kekayaan migas yang besar. Konflik yang muncul tidak sampai memuncak menjadi gerakan separatisme. Hanya pada kondisi tertentu, misalnya ketika faktor kelimpahan sumber daya alam ini berjalin berkelindan dengan identitas kedaerahan yang kuat dan dilatarbelakangi oleh sejarah panjang ketegangan daerah-pusat seperti dialami Aceh, maka ketidakpuasan atas distribusi manfaat dari kelimpahan kekayaan alam dapat mempertebal sentimen *political grievance* yang sudah ada sebelumnya dan pada gilirannya memperkuat aspirasi separatisme.

Kritik yang banyak dialamatkan pada penjelasan semacam ini adalah kecenderungannya pada determinisme teknologis. Oleh

karena itu, ketimbang menekankan pada karakteristik sumber daya alam, beberapa studi lebih memperhatikan para pelaku yang terlibat dalam konflik memperebutkan sumber daya alam. Seperti ditunjukkan Gambar 3.3 (lihat lingkaran di kiri bawah), literatur yang menekankan peran aktor ini membedakan dua motivasi yang mendasari keputusan para pelaku untuk terlibat dalam konflik terkait dengan sumber daya alam, yakni motivasi ekonomi dan motivasi politik. Penjelasan atas kedua motivasi ini kemudian dikenal dengan *greed theory* dan *grievance theory*.

Berdasarkan teori pertama, konflik seperti terjadi di negara-negara Afrika penghasil berlian akan dijelaskan sebagai bentuk "keserakahan", yaitu lebih didorong oleh motivasi keuntungan ekonomi melalui eksploitasi cadangan berlian yang melimpah. Namun, kasus konflik seperti terjadi di Sudan Selatan yang kaya minyak, akan dilihat lebih mencerminkan teori kedua, yaitu konflik yang lebih didorong oleh motivasi politik (Gambar 3.4).

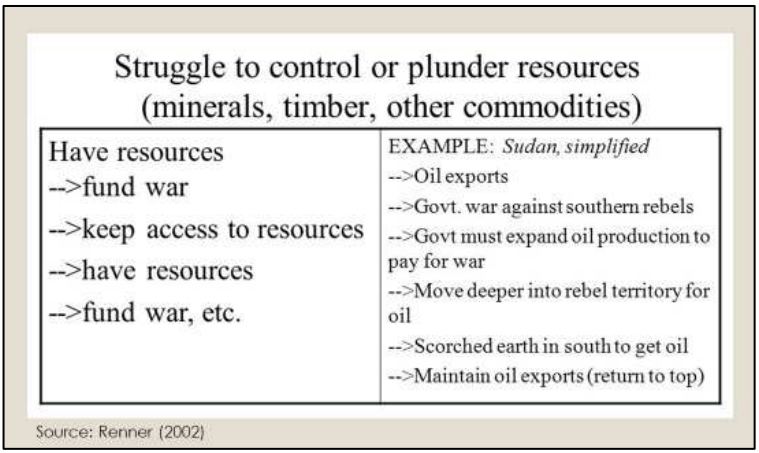

Gambar 3.4. Peran Kelimpahan SDA pada Separatisme di Sudan

Dalam kasus ini, faktor ketidakpuasan penduduk Sudan Selatan atas distribusi kekayaan alam yang diambil dari wilayahnya

dianggap sebagai penjelasan yang lebih memuaskan terhadap fenomena gerakan separatisme di kawasan ini dan sekaligus menjelaskan mengapa respons balik pihak pemerintah Sudan atas gerakan separatisme ini bersifat sangat represif dan penuh kekerasan.

Namun, ketika konflik terkait sumber daya alam sudah terjadi, apa pun motif awalnya, maka seiring dengan dinamika konflik kedua jenis motivasi di atas dapat saling berjalin berkelindan satu sama lain. Konflik di Aceh, misalnya, sering kali dijelaskan sebagai *resource war* karena ia turut dipicu oleh ketidakpuasan politik rakyat Aceh atas pembagian hasil kekayaan alam yang dieksploitasi dari bumi Aceh. Dengan kata lain, faktor *grievance* menjadi motivasi utama dalam kelahiran gerakan separatisme Aceh. Namun, begitu konflik telah meluas, maka berbagai jenis sumber daya alam di Aceh yang bersifat mudah dieksploitasi (*lootable*) seperti kayu, ganja, dan sebagainya pada akhirnya juga menyediakan sistem insentif bagi pelaku konflik (baik pihak separatis maupun militer Indonesia) untuk memperpanjang konflik itu sendiri. Sebab, kondisi konflik yang berlarut-larut memungkinkan mereka melakukan kegiatan ekonomi ilegal yang menguntungkan, seperti pembalakan kayu, pengedaran ganja, bahkan perdagangan senjata api dan amunisinya. Dengan demikian, kelimpahan sumber daya juga berperan membiayai konflik, membuatnya berkepanjangan, serta mencegah upaya-upaya penyelesaiannya (lihat Gambar 3.4).

Untuk menutup uraian mengenai sumber daya alam sebagai faktor risiko ini, pada Gambar berikut dikutip kerangka analisis dari Alao (2007) yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kondisi ketersediaan sumber daya alam terkait dengan berbagai manifestasi konflik.

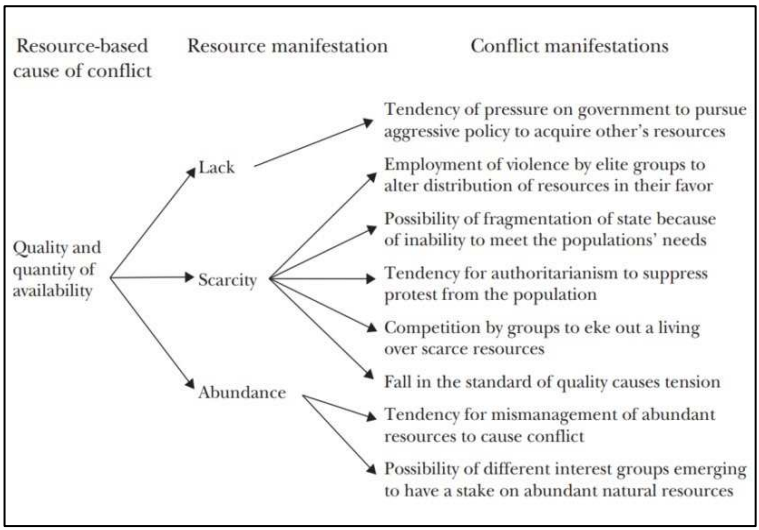

Gambar 3.5. Kaitan antara Kondisi Ketersediaan SDA dengan Berbagai Manifestasi Konflik (Sumber: Alao, 2007)

Seperti ditunjukkan Gambar di atas, peran sumber daya alam sebagai faktor risiko konflik terletak pada kualitas dan kuantitas dari ketersediaan sumber daya alam itu sendiri: apakah kondisi ketersediaannya kurang, langka, ataukah melimpah dan dengan kualitas seperti apa. Berdasarkan kerangka ini, berbagai kondisi ketersediaan sumber daya alam ini menjadi faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dengan manifestasi yang sangat beragam. [ ]

4

DAMPAK KONFLIK PADA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Menurut lembaga PBB yang berfokus di bidang lingkungan, UN Environment Program (UNEP), faktor sumber daya alam di satu pihak memang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik yang berskala besar. Namun, di pihak lain, ketika konflik ini sudah terlanjur terjadi dan meluas, maka lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri merupakan sasaran yang dapat terkena dampak paling besar dari konflik.

Sebagai misal, ketika berlangsung Perang Vietnam, tentara US telah melancarkan "Operation Ranch Hand" selama satu dekade (1961-1971). Dalam operasi ini salah satu strategi kontra-gerilya yang dilakukan oleh tentara US adalah dengan menyemprotkan campuran zat kimia *Agent Orange* atas lebih dari 2 juta ha hutan tropis. Strategi perang untuk melumpuhkan perlawanan tentara Viet Cong ini telah menimbulkan bencana ekologis yang parah dan dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Menyadari dampak ekologis yang demikian merusak ini, para ilmuwan dan aktivis perdamaian mengecam keras strategi perang semacam ini dan kemudian menjulukinya sebagai "Ecocide".

Hal serupa juga terjadi pada perang yang kini digencarkan oleh tentara Israel di Gaza. Sebelum 7 Oktober 2023, terdapat 170 km^2 areal pertanian di Gaza yang merupakan 47% luas wilayahnya. Namun, kondisinya sekarang mengalami kerusakan parah akibat aksi bombardemen yang dilakukan oleh Israel secara membabi

buta. Sampai akhir April 2024, Euro-Med Human Rights Monitor memperkirakan bahwa tidak kurang dari 70 ribu ton bom telah dijatuhkan Israel di atas wilayah Gaza yang hanya seluas 360 km^2. Jumlah ini adalah empat kali lipat dari bom nuklir setara 15.000 ton TNT yang dijatuhkan oleh US pada 1945 di atas kota Hiroshima dengan wilayah seluas 900 km^2.

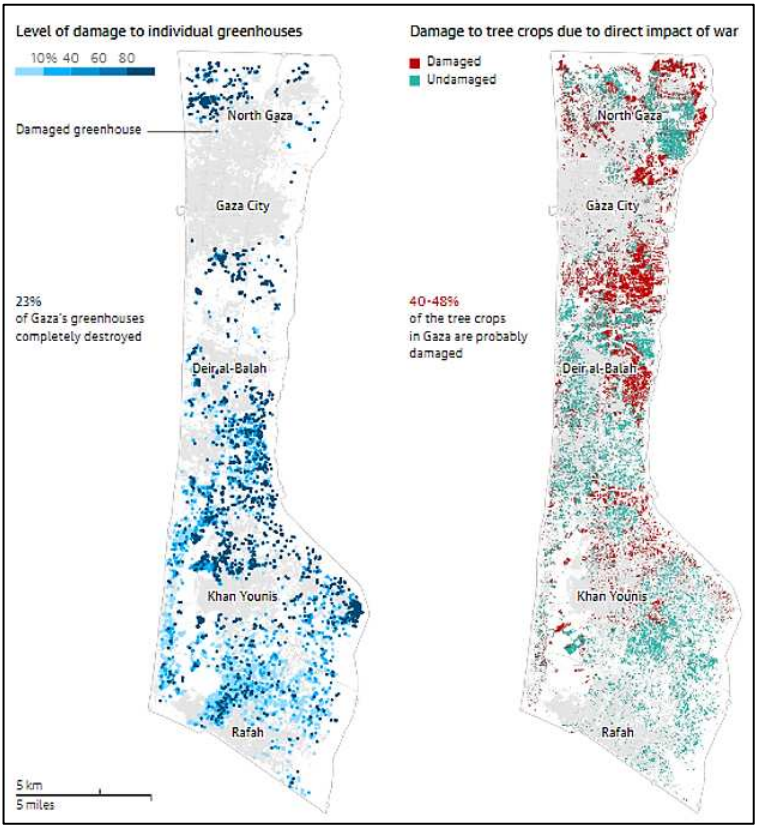

Gambar 4.1. Dampak Kerusakan Green House dan Lahan Pertanian Akibat Bombardemen Israel (Sumber: *The Guardian*, 29 Maret 2024)

Seperti ditunjukkan Gambar 4.1, bombardemen Israel yang tak pandang bulu atas wilayah Gaza telah menimbulkan dampak

kerusakan lingkungan yang mencapai skala "Ecocide". Sampai akhir Maret 2024 saja, antara 34-48% tutupan pohon dan lahan pertanian di Gaza telah rusak parah akibat bombardemen Israel, sementara tanah dan sumber air tercemari oleh amunisi, puing reruntuhan, dan bahan berbahaya. Perairan laut juga dipenuhi oleh sampah yang tak terolah, sementara udara tercemar oleh asap dan partikel beracun.[1]

Selain itu, jejak karbon selama 60 hari pertama perang Gaza saja diperkirakan telah melebihi emisi tahunan yang dihasilkan oleh 20 negara kecil. Para ahli juga memperkirakan jumlah jejak karbon itu setara dengan emisi dari pembakaran tidak kurang dari 150.000 ton batu bara. Kebanyakan emisi ini ditimbulkan oleh alat-alat perang Israel dan mata rantai pasok logistik perang dari US. Di pihak lain, emisi yang ditimbulkan oleh serangan roket Hamas hanya menyumbang kurang dari 1% di antaranya.[2]

Tentu saja, selain merupakan "Ecocide", jumlah korban jiwa yang sangat besar akibat bombardemen tanpa pandang bulu ini telah membuat perang Gaza sebagai "Genocide" itu sendiri. Aljazeera melaporkan, selama 7 Oktober 2023 hingga 12 Juni 2024 setidak-tidaknya 37.202 jiwa warga Gaza telah meninggal, termasuk lebih dari 15.000 anak-anak.[3] Angka ini belum termasuk korban warga Tepi Barat di bawah pendudukan Israel maupun korban warga Israel sendiri (lihat Gambar 4.2 untuk jumlah selengkapnya).

---

[1] https://www.theguardian.com/environment/2024/mar/29/gaza-israel-palestinian-war-ecocide-environmental-destruction-pollution-rome-statute-war-crimes-a0e.

[2] https://www.commonspace.eu/news/carbon-footprint-created-first-60-days-war-gaza-alone-surpassed-annual-emissions-20-small.

[3] Update periodik dampak perang di Gaza dan Tepi Barat dapat dilihat di sini: https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker

Gambar 4.2. Korban Luka dan Meninggal Akibat Perang Gaza
(Sumber: *Al Jazeera*, 12 Juni 2024)

Dua contoh yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa lingkungan dan sumber daya alam tidak saja merupakan faktor risiko yang dapat memicu terjadinya konflik. Namun, selain itu, keduanya juga dapat terdampak secara serius oleh dinamika konflik itu sendiri. Oleh karena itu, UNEP menekankan bahwa penilaian atas dampak ekologis dari konflik ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Demikian pula, penanganan atas dampak ekologis dari perang ini juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai program pembangunan pasca-konflik. []

5

PERAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI FAKTOR PELUANG PERDAMAIAN

Selain menjadi faktor risiko (*risk factor*) bagi terjadinya konflik berskala besar maupun menjadi variabel terdampak dari konflik yang berlangsung, sumber daya alam juga dapat menjadi faktor peluang (*opportunity factor*) bagi berbagai upaya menciptakan dan mengonsolidasikan perdamaian agar dapat berkelanjutan. Dengan ungkapan berbeda, faktor sumber daya alam ini dapat dikembangkan menjadi landasan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik menjadi kekerasan, menghentikan kekerasan ini jika sudah terlanjur meledak dan meluas, mendasari proses kesepakatan damai yang komprehensif, dan pada akhirnya juga mengarahkan proses pembangunan pasca-konflik yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka ini, UNEP telah mengembangkan satu kerangka pemikiran untuk dapat memperhitungkan peran positif sumber daya alam ini dan untuk mengembangkannya sebagai peluang untuk menginisiasi berbagai upaya perdamaian. Seperti dapat disimak pada Gambar 5.1, kontribusi positif sumber daya alam ini dapat dimulai sejak tahap mediasi pencegahan dan negosiasi konflik (*peace mediation and negotiation*), tahap pengembangan dan konsolidasi perdamaian (*peace building and consolidation*), hingga tahap pembangunan pasca-konflik yang dapat menjamin tercapainya berbagai dimensi keamanan insani (*human security*) secara berkelanjutan.

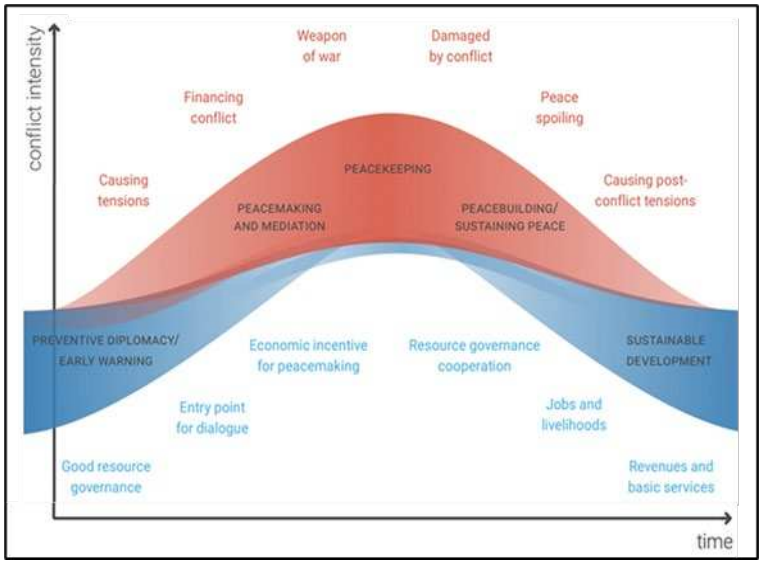

Gambar 5.1. Transformasi Peran SDA dari Faktor Risiko Konflik Menjadi Faktor Peluang Perdamaian (Sumber: UNEP)

Sebagai penjabaran lebih rinci atas kerangka di atas, UNEP juga menerbitkan berbagai publikasi yang komprehensif, mulai dari yang bersifat diskusi teoritis hingga panduan praktis. Untuk publikasi yang lebih bersifat teoritis, UNEP bekerja sama dengan sejumlah universitas dan lembaga kajian dari beberapa negara menerbitkan seri tentang *environmental peacebuilding*. Dalam seri publikasi ini dibahas secara rinci bagaimana faktor sumber daya alam dan lingkungan mesti diintegrasikan ke dalam semua upaya penyelesaian konflik, termasuk ke dalam berbagai operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB sendiri. Hal ini mencakup tahap *peace making*, *peace keeping*, hingga *peace building*. Pada tahap terakhir ini sendiri, karakteristik dari sumber daya alam (misalnya apakah bersifat ekstraktif ataukah terbarukan), perlu menjadi perhitungan dalam keseluruhan proses pembangunan dan konsolidasi perdamaian pasca-konflik (Gambar 5.3).

Gambar 5.2. Seri *Environmental Peacebuilding* Terbitan UNEP

Akhirnya, isu terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam juga menjadi pokok bahasan yang sangat ditekankan dalam seri ini. Di sini pembahasan juga dipilah menurut jenis sumber daya alamnya, yakni sumber daya alam yang bersifat ekstraktif seperti bahan tambang dan yang bersifat terbarukan seperti tanah, air, hutan, dan pertanian. Bagi UNEP, perbaikan tata kelola berbagai jenis sumber daya alam ini sangat mendesak dilakukan. Hal ini untuk memastikan agar seluruh proses pembangunan (terlebih yang terkait sumber daya alam) dapat sensitif konflik sejak tahap perencanaan, memiliki mekanisme mengantisipasi konflik dan *resource curse* selama tahap pelaksanaan, serta secara sistematis ditujukan untuk mewujudkan *human security* dalam berbagai dimensinya.

Untuk publikasi yang bersifat praktis, UNEP telah menerbitkan seri *Toolkit and Guidance* tentang pencegahan dan pengelolaan konflik terkait sumber daya alam (Gambar 5.2). Seri panduan ini secara jelas membedakan tiga kategori sumber daya alam, yaitu: ekstraktif, terbarukan dan tanah. Selanjutnya, seri ini diakhiri dengan satu panduan khusus tentang bagaimana menjalankan kebijakan ekonomi makro yang berbasis sumber daya alam.

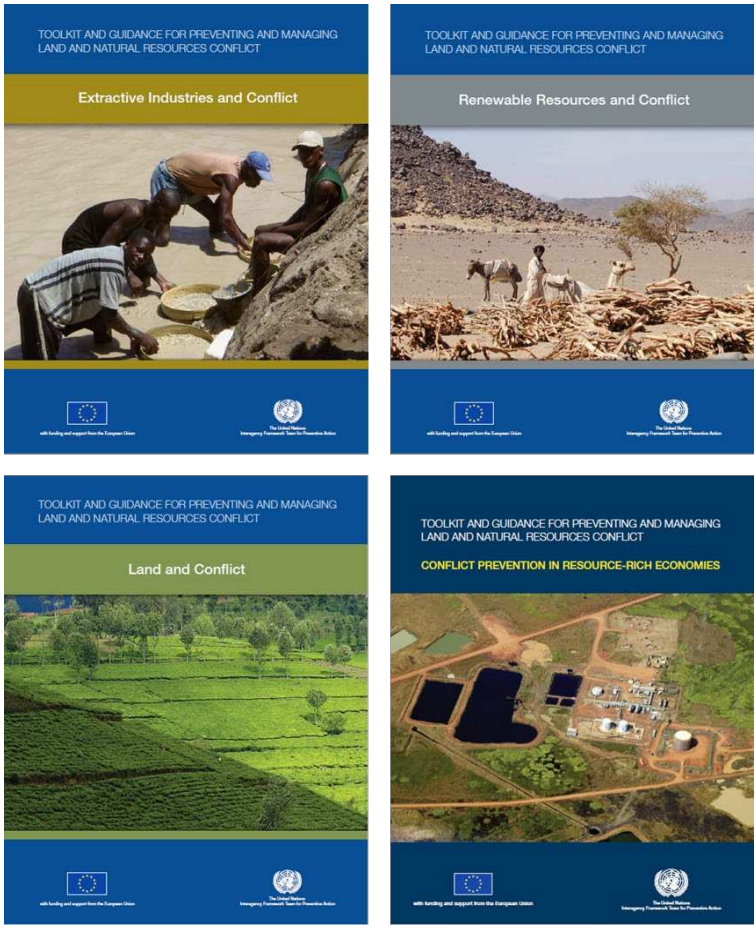

Gambar 5.3. Seri *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict* Terbitan UNEP

Dalam keempat buku panduan ini, fokus pembahasan adalah pada bagaimana sumber daya alam menurut berbagai jenisnya dapat dikelola agar tidak menjadi faktor risiko terjadinya konflik (*alert system mechanism*). Selanjutnya, bagaimana berbagai jenis sumber daya alam tersebut dapat diarahkan menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan kerja sama dan perdamaian di antara berbagai pihak yang bertikai sekaligus basis bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjadikan sumber daya alam ekstraktif sebagai landasan pembangunan yang peka konflik dan berkelanjutan, berikut ini adalah beberapa butir panduan yang disarankan oleh UNEP.

Gambar 5.4. Panduan untuk Sumber Daya Alam Ekstraktif

Untuk jenis sumber daya alam yang bersifat terbarukan, berikut ini adalah beberapa butir panduan yang disarankan oleh UNEP dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sensitif konflik dan sekaligus berkelanjutan.

Gambar 5.5. Panduan untuk Sumber Daya Alam Terbarukan

Dalam panduan ini, sumber daya alam berupa tanah menjadi kategori tersendiri dari jenis-jenis sumber daya alam terbarukan lainnya dan dibicarakan secara khusus pula. Hal ini karena tanah merupakan matriks dasar yang selalu menjadi elemen kunci di dalam setiap konflik dan mempunyai peran sangat menentukan dalam dinamika konflik yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa butir panduan yang disarankan secara khusus oleh UNEP untuk

memastikan tanah dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang sensitif konflik dan berkelanjutan.

Gambar 5.6. Panduan untuk Sumber Daya Alam Berupa Tanah

Akhirnya, seri penerbitan UNEP ini juga menyajikan panduan khusus untuk menghindari terjadinya fenomena *resource curse* atau "kutukan sumber daya alam". Fenomena ini lazim terjadi di negara-negara dengan struktur perekonomian nasional yang terlampau bergantung pada pendapatan dari sektor sumber daya alam. Hal ini biasanya mengakibatkan beberapa dampak makro-ekonomi seperti lemahnya tingkat diversifikasi ekonomi dan keterkaitan antar-sektor, banyaknya masalah menyangkut pengelolaan pendapatan dari sumber daya alam, terpuruknya pembangunan manusia di daerah-daerah yang justru memiliki sumber daya alam melimpah, dan ancaman kemerosotan dari

sumber daya alam itu sendiri jika dieksploitasi terus menerus secara tidak berkelanjutan.

Dalam rangka menghindari fenomena *resource curse* semacam ini, dan memastikan kebijakan ekonomi makro yang berbasis sumber daya alam dapat sensitif konflik dan berkelanjutan, di bawah ini adalah beberapa butir panduan yang disarankan oleh UNEP.

Gambar 5.7. Panduan Kebijakan Ekonomi Makro Berbasis SDA

Demikianlah, secara singkat telah disajikan beberapa publikasi dari UNEP yang menegaskan peran penting sumber daya alam dan lingkungan sebagai faktor peluang bagi proses perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. []

6

PENERAPAN KERANGKA TEORI UNTUK ANALISIS SIKLUS KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI ACEH

Melalui survei singkat atas sejumlah literatur teoritis yang telah dijelaskan di atas, diharapkan peran faktor sumber daya alam dalam dinamika konflik dan perdamaian dapat dipahami secara lebih komprehensif. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, pada bagian ini berbagai kerangka teoritis yang telah diulas di atas akan coba diterapkan untuk membahas satu kasus yang menonjol di Indonesia, yaitu dinamika konflik dan perdamaian di Aceh.

Dalam kasus Aceh ini, faktor sumber daya alam ternyata selalu hadir, terlibat dan memiliki kontribusi tertentu dalam berbagai tahap siklus konflik dan perdamaian yang terjadi. Pada Gambar 6.1 di bawah dicantumkan uraian singkat atas tiga tahap dalam siklus konflik dan perdamaian di Aceh. Berdasarkan uraian ini dapat dicermati bagaimana sumber daya alam dapat menjadi faktor risiko yang telah memicu beberapa periode konflik dalam sejarah pasang surut hubungan Aceh dengan Indonesia. Lantas, dapat dicermati juga bagaimana dinamika konflik di antara dua pihak yang bertikai ini telah menimbulkan dampak ekologis dan tenurial yang mendasar di tingkat lokal. Akhirnya, dari uraian itu juga dapat dicermati bagaimana sumber daya alam merupakan faktor peluang yang berusaha dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memulai inisiatif perdamaian guna mengakhiri konflik dan menghasilkan kesepakatan damai di Aceh. Namun, ketika

perjanjian damai ini pada akhirnya dapat dicapai, dari uraian itu juga dapat dicermati bagaimana berbagai komplikasi kemudian mencuat pada tahap pelaksanaan perjanjian damai dan selama keseluruhan proses pembangunan pasca-konflik di Aceh. Hal ini pada akhirnya memunculkan kembali faktor sumber daya alam sebagai sumber risiko bagi kemunculan konflik baru di Aceh.

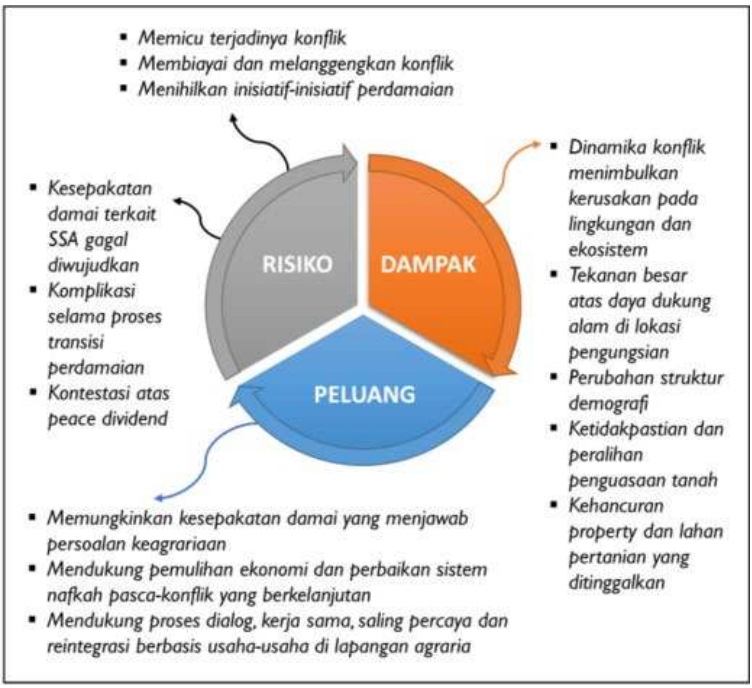

Gambar 6.1. Kerangka Pemikiran untuk Memahami Peran SDA dalam Siklus Konflik dan Perdamaian Aceh (Sumber: Shohibuddin, 2018)

Mengenai kemunculan konflik baru di Aceh ini, sejarah memang mencatat bahwa usai perdamaian dan setelah beberapa lama masa tenang, ketegangan dapat muncul kembali di Aceh. Hal ini tidak hanya terjadi antara Aceh dengan Indonesia, tetapi tidak jarang juga menghadap-hadapkan secara antagonistik beberapa kelompok dalam masyarakat Aceh sendiri. Begitulah, periode

baru konflik Aceh akan berulang lagi. Dan seperti ditunjukkan Gambar 6.2, faktor sumber daya alam dalam satu dan lain cara turut berperan dalam setiap kemunculan konflik baru di Aceh.

Gambar 6.2. Peran SDA dalam Berbagai Periode Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh (Sumber: Shohibuddin, 2016)

Apabila berbagai rentetan konflik di Aceh pada Gambar 6.2 di atas diperhatikan dengan cermat, akan terlihat bahwa sumber daya alam sebagai faktor risiko turut berperan dalam memicu konflik atau memengaruhi dinamika konflik yang terjadi. Di sini sumber daya alam sebagai faktor risiko mengandung pengertian seperti didefinisikan *grievance theory*, yaitu bahwa "keresahan sosial" terkait ketidakadilan alokasi dan distribusi manfaat dari sumber daya alam di Aceh telah menjadi salah satu pemicu dari berbagai rangkaian konflik yang terjadi di Aceh. Hal ini mulai dari revolusi sosial melawan *uleebalang* dalam rangka Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia pada paruh terakhir 1940-an,

pemberontakan Darul Islam untuk memperjuangkan otonomi daerah dan federalisme Indonesia pada periode 1950-an, hingga paling akhir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 1976-2005 yang justru memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia untuk menjadi negara tersendiri.

Di sisi lain, faktor risiko ini juga dapat diartikan secara berbeda sesuai definisi *greed theory*, yakni peran sumber daya alam di Aceh dalam membiayai dan melanggengkan konflik itu sendiri. Di sini, kelimpahan sumber daya alam telah membuat konflik di Aceh menjadi berulang atau berkepanjangan karena banyak aktor dapat mendulang insentif material dari situasi konflik di Aceh, baik aparat militer pemerintah Indonesia sendiri maupun gerilyawan GAM. Sebagai contoh, di masa konflik ada anekdot bahwa militer Indonesia pergi ke Aceh dengan membawa "M16" (jenis senapan serbu), akan tetapi kembali dari Aceh dengan membawa "16 M" (jumlah uang). Motif ekonomi serupa ini juga terdapat pada gerilyawan GAM, terutama mereka yang kurang ideologis dan baru direkrut belakangan pasca kejatuhan Orde Baru pada 1998. Hal ini karena situasi konflik memberi peluang pada golongan ini untuk menikmati keuntungan ekonomi dari pemungutan *pajak nangroe*, penjualan ganja, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam selalu hadir pada setiap periode konflik Aceh, bahkan sejak era Perang Sabil di masa kolonial, meskipun dengan peran yang berubah dari masa ke masa.

Selanjutnya, selain menjadi faktor risiko, sumber daya alam dan lingkungan juga dapat menjadi sasaran yang terdampak oleh dinamika konflik yang berlangsung di Aceh. Sebagai contoh, perang di Aceh telah menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup di medan perang (misalnya akibat aksi pemboman atau

strategi pembakaran hutan dan padang ilalang oleh aparat TNI). Selain itu, dampak ekologis juga terjadi atas daya dukung alam di tempat pengungsian dan relokasi. Hal ini karena salah satu strategi kontra-gerilya yang dijalankan oleh aparat TNI adalah memindahkan penduduk desa-desa pinggiran hutan yang dapat memasok logistik gerilyawan GAM ke lokasi-lokasi pengungsian di bawah kontrol militer. Tekanan populasi yang meningkat atas sumber daya terbatas di lokasi pengungsian telah berdampak pada degradasi lingkungan dan bahkan juga ketegangan dengan penduduk setempat.

Dampak lebih lanjut dari strategi perang semacam ini adalah membuat lahan pertanian di desa-desa asal menjadi terlantar dan akhirnya berubah menjadi semak belukar dan hutan. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian penguasaan tanah di desa-desa asal yang telah dikosongkan sehingga rawan untuk diambil alih pihak lain. Sebagaimana akan dijelaskan di bawah nanti, akuisisi tanah yang ditinggalkan para pengungsi ini banyak terjadi terutama pada periode pasca-konflik, baik hal itu dilakukan dengan cara yang sah maupun ilegal.

Akhirnya, sumber daya alam di Aceh juga telah dikembangkan sebagai faktor peluang baik untuk menghentikan permusuhan maupun lebih mendasar untuk menyelesaikan akar persoalan konflik dan sekaligus membangun landasan bagi perdamaian yang komprehensif di Aceh (Gambar 6.3). Sebagai misal, untuk mengakhiri pemberontakan Darul Islam di Aceh pada dekade 1950-an, salah satu paket perdamaian dari pemerintah Indonesia adalah kompensasi bagi para komandan Tentara Islam Indonesia (sayap militer Darul Islam) sejumlah perkebunan sawit, karet, kopi dan teh baik yang berada di Aceh sendiri atau di provinsi lain (termasuk di Jawa).

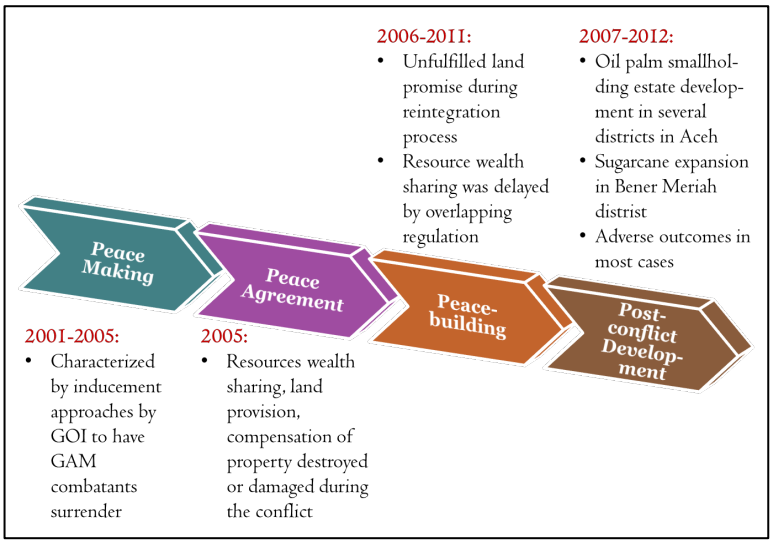

Gambar 6.3. Peran SDA dalam Proses Perdamaian dan Pembangunan Pasca-Konflik di Aceh (Sumber: Shohibuddin, 2016)

Pola penyelesaian konflik semacam ini juga coba diulang untuk mengakhiri perlawanan bersenjata GAM. Selama periode 2001-2005 misalnya, beberapa misi lobi rahasia telah dilancarkan pemerintah untuk mendekati pimpinan militer GAM di Aceh, namun tanpa sepengetahuan pimpinan politik GAM di Swedia. Dalam misi ini para komandan militer GAM dibujuk mengakhiri perlawanan mereka dengan imbalan mendapatkan uang dalam jumlah cukup besar, armada pesawat komersial untuk dikelola Aceh, dan perkebunan kelapa sawit PTPN di Aceh.

Namun, upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah selama 2001-2005 ini mengalami kegagalan. Hal ini karena pihak GAM sendiri—mungkin karena belajar dari pengalaman terdahulu—menolak pendekatan perdamaian yang pada dasarnya bersifat "iming-iming" (*inducement*) semacam ini. Dalam pendekatan ini pihak pemerintah menawarkan para komandan dan gerilyawan

GAM sejumlah insentif finansial dan konsesi sumber daya alam (bahkan juga jabatan politik) asalkan mereka mau meletakkan senjata dan "kembali ke pangkuan ibu pertiwi".

Kegagalan ini akhirnya memaksa pemerintah untuk menempuh upaya perundingan yang lebih komprehensif dengan pimpinan politik GAM di Swedia dengan mediasi pihak ketiga, yakni Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative (CMI) di Finlandia. Selama lima kali putaran perundingan di Helsinki, Finlandia, delegasi pemerintah RI dan GAM merundingkan isu-isu pelik di seputar pengelolaan sumber daya alam di Aceh dan keadilan distribusi hasilnya sebagai bagian dari penyelesaian konflik di Aceh secara keseluruhan. Isu-isu pelik terkait sumber daya alam ini antara lain mencakup kewenangan pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam di daratan maupun di perairan, proporsi bagi hasil minyak dan gas bagi Aceh, restitusi hak-hak tenurial dan *property* masyarakat yang rusak atau hilang selama masa konflik, dan penyediaan lahan pertanian untuk mantan gerilyawan GAM dan korban konflik.

Pada kenyataannya, hanya setelah isu-isu krusial terkait sumber daya alam (bersama partai lokal) dirundingkan dan disepakati, konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM yang sudah berlangsung selama hampir tiga dekade dapat dipungkasi secara konklusif melalui kesepakatan perdamaian yang komprehensif. Sementara berbagai upaya perdamaian sebelumnya mengalami kegagalan karena pemerintah selalu menghindari pembahasan mengenai isu-isu penting ini.

Tetapi, setelah perjanjian damai berhasil disepakati di Helsinki, ketegangan mulai muncul di Aceh ketika isi kesepakatan damai ini harus direalisasikan secara konkret di lapangan, termasuk menyangkut persoalan alokasi sumber daya alam di Aceh dan

distribusi manfaatnya. Akibatnya, sumber daya alam kembali menjadi faktor risiko yang melahirkan potensi terjadinya siklus baru konflik di Aceh, kendati dengan skala intensitas yang lebih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa periode transisi perdamaian dan konsolidasinya adalah tahap genting yang sangat menentukan. Apabila proses yang berlangsung pada tahap ini ditandai oleh ketidakadilan, misalnya saja apa yang dipersepsi sebagai *peace dividend* tidak terdistribusi secara adil di antara gerilyawan GAM sendiri atau masyarakat korban konflik, maka ketegangan dapat mengemuka bahkan di antara sesama masyarakat Aceh. Dan hal inilah yang kemudian memang mencuat pasca kesepakatan damai sehingga mendorong berulangnya konflik di Aceh. Meski intensitas konflik ini lebih rendah, namun cukup banyak nyawa yang melayang karena penggunaan senjata api yang tersisa dari masa perang.

Saat perundingan damai di Helsinki, para negosiator GAM atas pertimbangan keamanan hanya mencantumkan jumlah 3.000 gerilyawan GAM dalam perjanjian damai yang disepakati. Angka ini jauh di bawah jumlah anggota GAM sebenarnya yang terdiri atas komponen militer dan sipil. Keputusan ini menimbulkan konsekuensi serius hingga jauh ke depan. Sebagai misal, ketika program reintegrasi untuk gerilyawan GAM dijalankan, terjadi komplikasi karena pemerintah hanya menyediakan dana untuk 3.000 orang seperti tercantum di dalam Perjanjian Damai. Mau tidak mau, dana inilah yang harus dibagi pimpinan GAM kepada anggotanya yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketegangan di tubuh GAM sendiri.

Karena alasan yang sama, program penyediaan tanah pertanian sebagai salah satu bentuk *peace dividend* tidak dapat diwujudkan

sama sekali, baik yang ditujukan untuk gerilyawan GAM atau korban konflik. Padahal, program ini sebenarnya adalah koreksi mendasar atas pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan pemberontakan Darul Islam di mana para pemimpin mendapat kompensasi alokasi sumber daya alam yang menggiurkan, tetapi anak buah dan korban konflik justru tersisih sebagai golongan penerima manfaat.

Menyikapi kegagalan ini, Gubernur Irwandi Yusuf—pimpinan GAM yang memenangkan Pilkada pada 11 Desember 2006—menggulirkan program pembangunan kebun kelapa sawit yang diperuntukkan bagi anggota GAM dan korban konflik. Namun, program ini justru semakin menambah kekacauan di lapangan. Sebagian bibit sawit yang disediakan kontraktor melalui tender pemerintah ternyata adalah bibit palsu yang tidak bersertifikat sehingga harus dimusnahkan. Sementara itu, banyak tanah yang menjadi lokasi pembangunan kebun kelapa sawit ternyata milik para pengungsi yang pada masa konflik menyelamatkan diri ke luar daerah sehingga menimbulkan sengketa lahan.

Komplikasi menyangkut distribusi *peace dividend* ini serta friksi di tubuh GAM sendiri dalam persaingan politik di Pilkada adalah konteks yang melatari kemunculan "kasus Din Minimi", yaitu pemberontakan bersenjata oleh puluhan gerilyawan GAM yang meletup pertama kali pada 9 Oktober 2014. Yang menarik adalah pemberontakan kelompok ini justru ditujukan pada pemimpin GAM yang telah menguasai pucuk pemerintahan Provinsi Aceh. Kasus ini adalah konflik bersenjata yang paling menonjol pasca perjanjian damai di Helsinki, meski akhirnya berhasil diredam dan didamaikan oleh pemerintah.

Jadi, apa kesimpulan penting dan pelajaran yang dapat diambil dari pemaparan kasus Aceh ini? Pertama, ketidakadilan dalam

alokasi sumber daya alam dan hasil kekayaan alamnya turut memicu terjadinya konflik penuh kekerasan dan bahkan perang berskala besar di Aceh. Karena peran besar sumber daya alam sebagai faktor risiko ini, terutama pada periode konflik terakhir antara pemerintah RI dengan GAM, maka perang Aceh juga mendapat julukan sebagai salah satu wujud dari "resource war" atau lebih spesifik "oil war" (Kaldor et al. eds, 2007).

Selanjutnya, dinamika kekerasan serta praktik ilegalitas yang banyak berlangsung pada masa konflik ternyata tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, akan tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam di pedesaan. Hal ini terjadi seiring aksi pengusiran dan bahkan pembunuhan atas etnis pendatang, pengambilalihan tanah dan harta benda terlantar yang ditinggal pemiliknya mengungsi, dan sebagainya. Korbannya tidak terbatas pada etnis Jawa saja yang kerap menjadi sasaran serangan GAM karena dituding mata-mata pemerintah, akan tetapi juga etnis Aceh yang merupakan kelompok pendatang di dataran tinggi Gayo karena dituding sebagai pendukung GAM.

Namun, sejarah penyelesaian konflik di Aceh juga menunjukkan bahwa sumber daya alam dapat berperan penting sebagai salah satu faktor peluang yang memungkinkan kesepakatan damai yang komprehensif dapat dihasilkan. Melalui lima kali putaran perundingan damai di Helsinki sejak Januari hingga Juli 2005, pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya menyepakati pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur peran sumber daya alam dalam penyelesaian akar konflik dan pemantapan perdamaian, seperti proporsi bagi hasil yang lebih adil dari kekayaan alam Aceh, kewenangan besar pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, distribusi tanah pertanian

bagi gerilyawan GAM dan korban konflik, restitusi harta benda yang rusak atau musnah selama konflik, dana otonomi khusus untuk pemulihan dan pembangunan Aceh pasca-konflik, di samping berbagai kesepakatan mendasar lain di bidang politik seperti partai lokal, lembaga Wali Nanggroe, dan sebagainya.

Sayangnya, setelah kesepakatan damai tercapai, banyak janji yang termuat dalam perjanjian Helsinki tidak dapat diwujudkan atau dipenuhi namun dengan cara-cara yang dianggap lebih mengistimewakan pihak tertentu saja. Hal terakhir ini terjadi karena selama proses transisi perdamaian, terjadi friksi yang sangat tajam di tubuh GAM sendiri. Di sisi lain, selama periode genting transisi perdamaian pihak GAM dan pemerintah sama-sama kerap mendesakkan pendekatan sekuritisasi, yakni lebih mengedepankan pertimbangan keamanan dalam arti sempit yang justru berdampak negatif pada konsolidasi perdamaian dan kualitas demokrasi pasca-konflik.

Periode transisi perdamaian ini juga diwarnai oleh meluasnya praktik korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan yang sangat merugikan pembangunan pasca-konflik dan pemulihan taraf hidup masyarakat. Banyak bantuan lembaga donor atau dana publik pemerintah untuk program perdamaian maupun pemberdayaan masyarakat menjadi ajang berebut keuntungan di antara segelintir elite dan aktor konflik dari kubu berlawanan (*profitable peace*), sementara rakyat yang menjadi korban konflik sering kali justru tidak memperoleh manfaat yang signifikan dari program-program tersebut. Kesemua ini pada akhirnya memicu berbagai ketegangan di internal masyarakat Aceh, yang bahkan telah melahirkan siklus konflik baru kendati dengan intensitas rendah, di mana sumber daya alam menjadi salah satu faktor risiko yang turut berperan di baliknya. []

7

PENERAPAN KERANGKA TEORI UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM MATA KULIAH

Uraian di atas telah menunjukkan pentingnya memahami arti penting sumber daya alam dalam ragam jenis, kondisi dan corak eksploitasinya dan peran yang dapat dimainkannya baik dalam memicu konflik berskala besar maupun dalam menyediakan landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bukan saja berlaku pada kasus-kasus di mancanegara, namun juga sangat relevan untuk memahami dinamika konflik dan perdamaian yang terjadi di Indonesia sendiri. Yang terakhir ini ditunjukkan melalui analisis siklus konflik dan perdamaian di Aceh.

Menyadari hal ini, maka sejak semester genap tahun akademik 2020-2021, di Institut Pertanian Bogor—tepatnya di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia—dikembangkan satu mata kuliah yang secara khusus berfokus pada persoalan ini. Mata kuliah tersebut diberi nama "Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian" (disingkat SDAKP) yang diberikan kepada mahasiswa S1 yang mengambil peminatan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Namun, konsep "perdamaian" dan "konflik" dalam mata kuliah ini dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yakni mengacu pada kondisi keamanan dan ketidakamanan insani atau *human* (*in*)*security*. Perluasan makna "perdamaian" sebagai keamanan insani (*human security*) dan "konflik" sebagai ketidakamanan

insani (*human insecurity*) ini tidak terlepas dari pergeseran konsep keamanan sendiri pasca keruntuhan Tembok Berlin pada 9 November 1989. Sebelum peristiwa bersejarah ini, konflik selalu dilihat dalam konteks Perang Dingin sebagai pertarungan antara negara-negara demokrasi di bawah pimpinan US (Blok Barat) melawan negara-negara komunis di bawah pimpinan Uni Soviet (Blok Timur).

Namun, setelah Uni Soviet sendiri akhirnya bubar pada 25 Desember 1991 dan ancaman Blok Timur dianggap sudah tidak ada lagi, maka konsep keamanan juga mulai bergeser. Alih-alih mengacu pada pertahanan nasional suatu negara dari ancaman militer pihak luar, konsep keamanan kini lebih dipusatkan pada manusia itu sendiri atau *people-cenetred security*. UNDP lantas memperkenalkan konsep *human security* untuk memaksudkan pengertian keamanan terakhir yang berpusat pada manusia ini, sementara pengertian lama yang berpusat pada negara dijuluki dengan istilah *traditional security*.

Dalam laporan UNDP *Human Development Report 1994*, konsep *human security* ini diperkenalkan secara resmi oleh UNDP untuk mengaitkan makna keamanan lebih kepada manusia ketimbang teritori negara, serta kepada pembangunan daripada pertahanan militer. Menurut laporan ini, keamanan insani (atau dalam mata kuliah ini juga disebut "perdamaian") adalah suatu kondisi di mana setiap manusia bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), bebas dari hambatan memenuhi kebutuhan dasarnya (*freedom from want*), dan bebas untuk hidup secara bermartabat (*freedom to live in dignity*). Menurut UNDP, realisasi ketiga kebebasan ini tergantung pada sejauh mana setiap negara mampu memenuhi tujuh dimensi keamanan insani seperti dijelaskan pada Gambar 7.1 di bawah ini.

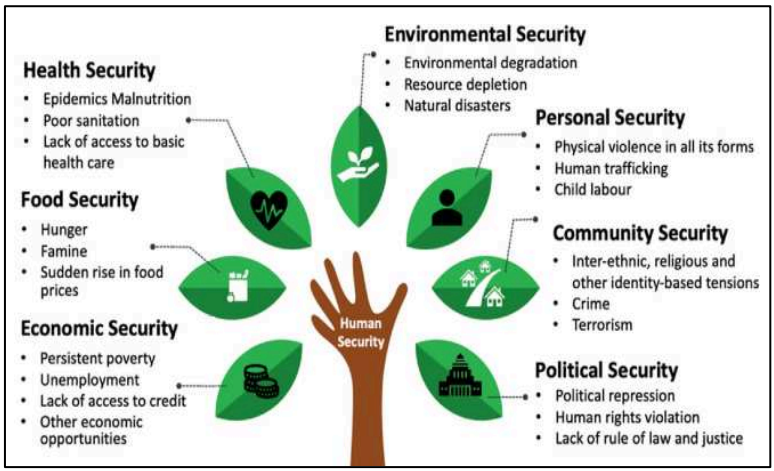

Gambar 7.1. Tujuh Dimensi Keamanan Insani Menurut UNDP
(Gambar dikutip dari Takeda & Yamahata, 2022)

Ketujuh dimensi "perdamaian" atau keamanan insani ini saling berkaitan satu sama lain sehingga kondisi ketidakamanan insani pada satu dimensi akan berpengaruh pada dimensi yang lain. Hanya saja, sesuai dengan fokus mata kuliah SDAKP ini, maka dimensi yang lebih ditekankan adalah keamanan lingkungan (*environmental security*). Dalam arti, dimensi keamanan ini lebih banyak diperhitungkan oleh mata kuliah ini sebagai faktor kunci yang dapat berkontribusi secara signifikan baik pada terciptanya kondisi keamanan, atau sebaliknya ketidakamanan, insani pada semua dimensinya.

Sejalan dengan uraian mengenai peran sumber daya alam yang telah disajikan pada bagian terdahulu, kondisi yang berlangsung pada dimensi lingkungan ini dapat menjadi faktor risiko bagi terjadinya konflik, atau menjadi variabel terdampak dari kondisi ketidakamanan pada dimensi lain, atau menjadi faktor peluang untuk mewujudkan seluruh dimensi keamanan insani. Hal ini dapat diilustrasikan melalui Gambar 7.2 di mana ditunjukkan

peran yang dimainkan faktor lingkungan dalam siklus konflik dan perdamaian.

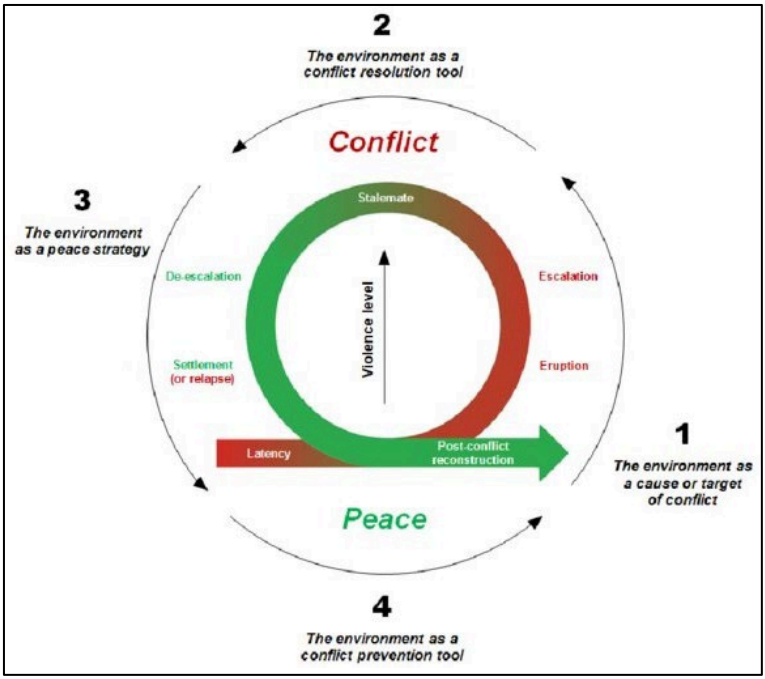

Gambar 7.2. Faktor Lingkungan dalam Siklus Konflik dan Perdamaian (Sumber: Dresse et al., 2016)

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan mata kuliah SDAKP dilakukan dengan mengelompokkan topik-topik kurikulumnya ke dalam enam bagian, yaitu: (1) pengantar dan pendekatan; (2) lingkungan dan sumber daya alam sebagai faktor risiko; (3) lingkungan dan sumber daya alam sebagai variabel terdampak; (4) lingkungan dan sumber daya alam sebagai faktor peluang; (5) faktor lingkungan dan sumber daya alam dalam dinamika konflik dan perdamaian di Indonesia; dan (6) refleksi dan pembelajaran. Keenam topik ini lantas dirinci ke dalam sejumlah pokok bahasan seperti disajikan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1. Topik dan Pokok Bahasan pada Mata Kuliah
"Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian"

Topik Perkuliahan	Pokok Bahasan (14 Kali Tatap Muka)
A. Pengantar dan Pendekatan	1. Pendahuluan
	2. Pendekatan Konseptual dan Teoritis
B. Lingkungan dan SDA sebagai Faktor Risiko	3. Kelimpahan SDA sebagai Sumber *Human Insecurity*
	4. Kelangkaan SDA dan Tekanan Populasi sebagai Sumber *Human Insecurity*
	5. Migrasi dan *Human Insecurity*
	6. Perubahan Iklim sebagai Sumber *Human Insecurity*
C. Lingkungan & SDA sebagai Variabel Terdampak	7. Dampak Ekologis dan Sosial-ekonomi dari Konflik dan Konsekuensinya pada *Human Insecurity*
D. Lingkungan dan SDA sebagai Faktor Peluang	8. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Penciptaan Perdamaian dan "Kontrak Politik" Baru
	9. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Konsolidasi Perdamaian, Pembangunan Pasca-konflik dan Pembaruan Tata Kelola SDA
E. Faktor Lingkungan dan SDA dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian di Indonesia	10. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Kasus-kasus Konflik Berskala Besar di Indonesia
	11. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Kasus Konflik Komunal di Poso serta Upaya Penyelesaiannya
	12. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Kasus Konflik Etnonasionalisme Aceh serta Upaya Penyelesaiannya
	13. Peran Faktor Lingkungan dan SDA dalam Kasus Konflik Etnonaionalisme Papua serta Upaya Penyelesaiannya

Topik Perkuliahan	Pokok Bahasan (14 Kali Tatap Muka)
F. Refleksi dan Pembelajaran	14. Menuju Pembangunan Berbasis SDA yang Peka Konflik, Menjamin Keamanan Insani, dan Berkelanjutan

Di akhir perkuliahan, mahasiswa peserta mata kuliah SDAKP ini diwajibkan menyusun tugas kelompok berupa *Policy Brief*. Hal ini sesuai dengan metode perkuliahan ini yang berupa *problem-based and solution-oriented learning*. Oleh karena itu, *Policy Brief* ini menyumbang porsi yang cukup besar dalam penilaian akhir prestasi mahasiswa pada mata kuliah ini.

Adapun tema *Policy Brief* tersebut dapat dipilih di antara pokok-pokok bahasan pada Tabel 7.1 di atas yang kemudian diterapkan untuk menganalisis satu kasus di tanah air yang mereka tentukan sendiri. Melalui penulisan *Policy Brief* ini mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan peran sumber daya alam dalam memicu konflik di berbagai daerah di penjuru tanah air. Hal ini sekaligus disertai rekomendasi mengenai langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut, termasuk dengan memperhitungkan kontribusi yang dapat dimainkan oleh faktor sumber daya alam itu sendiri pada proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. []

8

PENUTUP

Survei teoritis pada beberapa bab di awal buku ini, dilanjutkan dengan upaya penerapannya pada kasus dinamika konflik dan perdamaian Aceh, telah memperlihatkan betapa penting peran yang dapat dimainkan faktor sumber daya alam bagi terciptanya kondisi keamanan atau sebaliknya ketidakamanan insani. Peran yang dimainkan ini bisa dalam arti negatif, yakni sumber daya alam sebagai pemicu konflik, maupun dalam arti positif, yakni sumber daya alam sebagai landasan, bahkan komponen kunci, upaya resolusi konflik dan proses perdamaian.

Menyadari hal ini, maka ada kebutuhan yang mendesak untuk dapat mengenali secara mendalam berbagai karakteristik dari sumber daya alam itu sendiri. Lalu dari sini dilanjutkan dengan mengidentifikasi secara cermat kaitan yang dapat berlangsung antara sumber daya alam dalam ragam karakteristiknya dengan dinamika konflik dan perdamaian yang terjadi. Pengembangan mata kuliah "Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian" di Institut Pertanian Bogor adalah salah satu ikhtiar dalam rangka memenuhi kebutuhan ini.

Dengan demikian, ketika inisiatif resolusi konflik dan proses perdamaian hendak dijalankan, sangat penting untuk terlebih dulu memahami dan memperhitungkan karakteristik sumber daya alam yang terlibat di dalamnya dan kompleksitas peran yang dapat dimainkannya. Dari sini diharapkan setiap upaya resolusi konflik, kesepakatan damai, konsolidasi perdamaian,

maupun pembangunan pasca-konflik dapat sensitif pada peran sumber daya alam itu sendiri sehingga potensi negatifnya dapat diantisipasi dan kontribusi positifnya dapat dioptimalkan.

Dalam konteks pembangunan secara umum, pemahaman atas kompleksitas berbagai aspek sumber daya alam ini juga dapat memberikan kewaspadaan atas potensi konflik yang bisa dipicu oleh faktor sumber daya alam tersebut. Dengan kewaspadaan ini, maka konflik dapat diantisipasi sejak awal sebelum seluruh proses pembangunan dijalankan. Pada saat yang sama, peran positif dari sumber daya alam dalam proses pembangunan dapat dipastikan, yaitu sebagai sumber berkembangnya kesejahteraan masyarakat dan landasan bagi pembangunan yang berkeadilan, yang menjamin keamanan insani, dan berkelanjutan. []

BIBLIOGRAFI TERPILIH

A. Human Security

Takeda, Makiko & Chosein Yamahata (2022) "Human Security and the Roles of Ethnic Women's Organisations in Transitional Myanmar." In: Yamahata, C. and Anderson, B. (eds.) *Demystifying Myanmar's Transition and Political Crisis.* Singapore: Palgrave Macmillan.

[UNDP] United Nations Development Programme (1994) *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York.

United Nations Trust Fund for Human Security (2016) *Human Security Handbook.* New York.

B. Kelangkaan Sumber daya Alam Sebagai Pemicu Konflik

Berchim, Issa Ibrahim, Isabela Blasi Valduga, Jéssica Garcia, José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra (2017) "Climate Cchange and Forced Migrations: An Effort towards Recognizing Climate Refugees." *Geoforum*, 84: 147-150.

Gleditsch, Nils Petter & Henrik Urdal (2002) "Ecoviolence? Links between Population Growth, Environmental Scarcity and Violent Conflict in Thomas Homer-Dixon's Work." *Journal of International Affairs,* 56(1): 283-302.

Gleditsch, Nils Petter & Ragnhild Nordås (2010) "Climate Change and Conflict: A Critical Overview." *Die Friedens-Warte*, 7-24.

Homer-Dixon, Thomas (1999) *The Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ide, Thomas (2017) "Research Methods for Exploring the Links between Climate Change and Conflict." WIREs Climate

Change, 8(3): 1-14.
Kaplan, Robert D. (2000) *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War*. New York: Random House.
Miller, DeMond S. (2017) "Climate Refugees & the Human Cost of Global Climate Change." *Environmental Justice*, 10(4): 89-92.
Suliman, Mohamed (2004) *Darfur, Resource War and Identity War*. Cambridge: Academic Press.
Stalley, Phillip (2003) "Environmental Scarcity and International Conflict." *Conflict Management & Peace Science*, 20(1): 33-58.

C. Kelimpahan Sumber daya Alam dan Agraria sebagai Akar Konflik

Alao, Abiodun (2007) *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. University of Rochester Press.
Billon, Philippe Le (2009) "Natural Resource Types and Conflict Termination Initiatives." *Colombia Internacional*, 70: 9-34.
Collier, Paul & Anke Hoeffler (2004) "Greed and Grievance in Civil War." *Oxford Economic Papers*, 56(4): 563-595.
Cramer, Christopher & Paul Richards (2011) "Violence and War in Agrarian Perspective." *Journal of Agrarian Change*, 11(3): 277-297.
Humphreys, Macartan (2005) "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms." *The Journal of Conflict Resolution*, 49(4): 508-537.
Kaldor, Mary, Terry Lynn Karl and Yahia Said, eds. (2007). *Oil War*. London: Pluto Press.
Renner, Michael (2002) "The Anatomy of Resource Wars." *Worldwatch Paper 162*.

Richards, Paul (2005) "To Fight or to Farm? Agrarian Dimensions of the Mano River Conflicts (Liberia and Sierra Leone)." *African Affairs*, 104(417): 571-590.

Ross, Michael L. (2004) "What Do We Know about Natural Resources and Civil War?" *Journal of Peace Research*, 41(3): 337-356.

D. Dinamika Konflik dan Dampaknya pada Sumber daya Alam dan Struktur Agraria

Delgado-Matas, Cristobal, Blas Mola-Yudego, David Gritten, David Kiala-Kalusing, Timo Pukkala (2015) "Land Use Evolution and Management under Recurrent Conflict Conditions: Umbundu Agroforestry System in the Angolan Highlands." *Land Use Policy*, 42: 460-470.

Gómez, Carlos J. L., Luis Sánchez-Ayala & Gonzalo A. Vargas (2015) "Armed Conflict, Land Grabs and Primitive Accumulation in Colombia: Micro Processes, Macro Trends and the Puzzles in Between." The Journal of Peasant Studies, 42(2): 255-274.

Jensen, David & Steve Lonergan (2012) *Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding*. New York: Earthscan.

[UNEP] United Nations Environment Programme (2009) *Integrating Environment in Post-Conflict Needs Assessments*. Nairobi: UNEP.

E. Peran Sumber daya Alam dalam Proses Perdamaian dan Pembangunan Pasca-Konflik

Beevers, Michael D. (2019) *Peacebuilding and Natural Resource Governance After Armed Conflict*. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Borras Jr, Saturnino M. & Jennifer C. Franco (2011) "Land, Conflict and the Challenge of Pro-poor Peace-building: Critical issues for Discussion." *FriEnt Essay Series 07*.

Dresse, Anaïs, Jonas ØNielsen & Dimitrios Zikos (2016) "Moving beyond Natural Resources as a Source of Conflict: Exploring the Human-environment Nexus of Environmental Peace-building." HESys Discussion Paper No. 2016-2. Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.

[UNEP] United Nations Environment Programme (2009) *From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment.* Nairobi: UNEP.

---------- (2009) *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential.* Nairobi: UNEP.

Young, Helen & Lisa Goldman (2015) *Livelihoods, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding*. New York: Earthscan.

F. Sumber daya Alam dan Agraria dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian di Aceh

Aspinall, Edward (2007) "The Construction of Grievance Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict." *Journal of Conflict Resolution*, 51(6): 950-972.

Prasetyo, Stanley Adi & George Junus Aditjondro (2011) "Profitable Peace." Chapter 4 in Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, eds. *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Yogyakarta: PCD Press.

Lund, Christian (2018) "Predatory Peace: Dispossession at Aceh's Oil Palm Frontier." *The Journal of Peasant Studies*, 45(2): 431-452.

Shohibuddin, Mohamad (2016) "Making Peace or Sustaining Conflict? Securitasation of Land Distribution Programme

in Post-war Aceh." Paper presented at Ecology, Culture and Development seminar series, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University, 31 May 2016.

---------- (2018) *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, khususnya Bagian IV: Konflik dan Perdamaian di Aceh dari Perspektif Agraria. Yogyakarta: STPN Press.

Ross, Michael L. (2005) "Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia." Chapter 2 in Paul Collier and Nicholas Sambanis, eds. *Understanding Civil War: Evidence and Analysis. Volume 2: Europe, Central Asia, and Other Regions.* Washington DC: The World Bank.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA – INDONESIA

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

MOHAMAD SHOHIBUDDIN (biasa disapa Shohib) adalah pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Selain itu, ia juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama yang membawahi Sajogyo Institute sebagai badan pelaksana yayasan.

Ia telah menulis beberapa buku, dua yang terakhir berjudul *Falsafah Agraria dalam Perspektif Konstitusi* (diterbitkan oleh STPN Press dan Sajogyo Institute, 2024) dan *Fikih Agraria: Sebuah Perbincangan* (ditulis bersama M. Nashirulhaq dan diterbitkan oleh Kasan Ngali, Yogyakarta, 2022,). Daftar karya tulis lengkapnya dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: http://ipb.link/shohib.

PENGURUS CABANG ISTIMEWA

NAHDLATUL ULAMA BELANDA

https://nubelanda.nl

Sajogyo
Institute
https://sajogyo-institute.org

Dalam studi konflik dan perdamaian, faktor sumber daya alam (SDA) menempati posisi yang unik karena dianggap dapat berperan ganda. Di satu pihak dapat menjadi faktor risiko bagi kemunculan konflik dan bahkan perang yang penuh kekerasan. Di pihak lain, juga dapat menjadi faktor peluang bagi upaya penyelesaian konflik, kerja sama dan perdamaian. Dalam diskursus *human security*, faktor SDA juga sangat sentral karena mencerminkan aspek keamanan lingkungan yang sangat menentukan kondisi enam aspek *human security* lainnya, yakni kesehatan, pangan, politik, ekonomi, komunitas dan personal.

Buku ini menyajikan survei teoritis mengenai peran ganda SDA ini, baik sebagai *faktor risiko* yang memicu konflik, *variabel terdampak* yang menjadi sasaran konflik, maupun *faktor peluang* yang mendasari proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. Hasil survei teoritis mengenai peran SDA ini—baik terhadap kondisi keamanan maupun ketidakamanan manusia—lantas diterapkan pada konteks Indonesia untuk dua tujuan berikut ini. Pertama, sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan dinamika konflik dan perdamaian di tanah air dengan ilustrasi kasus Aceh. Kedua, sebagai acuan teoritis untuk mengembangkan kurikulum perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini mata kuliah "Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian".

Sajogyo Institute

ISBN 978-602-51050-7-9
9 786025 126079